

POLITIK LUAR NEGERI OMAN DI BAWAH  
PEMERINTAHAN SULTAN QABOOS (1970-1985)  
DAN  
HUBUNGANNYA DENGAN AMERIKA SERIKAT

**SKRIPSI**



Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember



Asal:	Hediah	Klass
	<del>Pembelian</del>	327.5353
Terima Tanggal:	31 JUL 2002	FIR
Oleh:	1295	P
	KLASIR/ E YA I	SFS.

S

**Wahyu Akbar Firdaus**

NIM. 970910101016

**Pembimbing :**

Drs. Sjoekron Sjah, SU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

2002

e.1

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

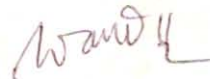
**Nama: Wahyu Akbar Firdaus**

**Nim : 970910101016**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari sumber-sumber yang sah diketahui.

Demikian pernyataan tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, Mei 2002



Wahyu Akbar Firdaus

## PENGESAHAN

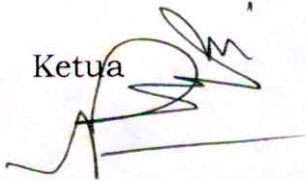
Diterima dan Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Skripsi  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1)

Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Hari: Senin  
Tanggal: 27 Mei 2002  
Jam : 08.00 WIB

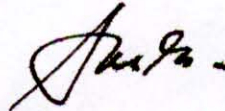
Panitia Penguji

Ketua



(Drs. Nuruddin M. Yasin)

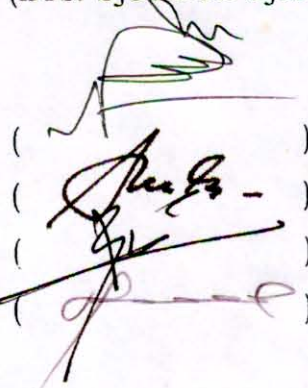
Sekretaris



(Drs. Sjoekron Sjah, SU)


Anggota:

1. Drs. Nuruddin M. Yasin
2. Drs. Sjoekron Sjah, SU
3. Drs. Achmad Habibullah, MSi
4. Drs. Joko Susilo, MSi



Mengetahui:  
Dekan



  
Drs. H.M Toerki  
Nip: 130 524 832

## MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S. Ar Ra’du: 11)\*

“Barangsiapa melepaskan salah satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahan hari kiamat darinya. Barangsiapa memudahkan orang yang tengah dilanda kesulitan maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. (Diriwayatkan oleh Imam Muslim)”\*

---

\* Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994

\* Syaikh Imam Nawawi, *Hadits-hadits Arba'in Nawawiyah*, Intermedia, Solo, 2000, hal. 86

## PERSEMBAHAN

Dengan Segala kerendahan hati aku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. *Ibunda Siti Nur Rahmadiyah Hanief dan Ayahanda Winaryo.*  
Salam kuhaturkan dari balik “terali penjara dunia” ini. Aku sayang kalian seperti halnya kalian menyayangi tubuhku. Semoga Allah selalu melimpahkan keselamatan, kesabaran kepada kalian. Sungguh aku rasakan belaian tangan, rasa sayang kalian kepadaku. Tak terbayangkan olehku keluh kesah yang kalian sembunyikan hanya untuk kebahagiaanku. Tak terhitung berapa juta kalian keluarkan untuk merawat, mendidikku dan sebuah gelar sarjana yang Insya Allah tidak akan ditanya oleh Allah di Akhirat nanti. Insya Allah aku akan membalas kesungguhan dan kepedihan kalian tatkala sesuatu yang diinginkan anakmu tidak kalian dapatkan.
2. Adik-adikku tersayang, Kiki dan Pipit dengan kritik dan kasih sayang yang amat berharga.
3. Almamaterku tercinta, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UNEJ

## **Kata Pengantar**

Tiada kata yang pantas diucapkan melainkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Politik Luar Negeri Oman di Bawah Pemerintahan Sultan Qaboos (1970-1985) dan Hubungannya dengan Amerika Serikat”**

Penulisan skripsi ini merupakan wujud nyata dari proses belajar penulis selama beberapa tahun di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Selama proses penyusunan, skripsi ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada ternilai kepada:

1. Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional dan Dosen Pembimbing yang penuh dedikasi membantu penyelesaian skripsi ini dan tiada hentinya mengingatkan penulis untuk senantiasa bertakwa pada Allah SWT
2. Drs. Achmad Habibullah, MSi, selaku Dosen Wali penulis selama kuliah.
3. Bapak Drs. M. Toerki, Dekan FISIP, UNEJ.
4. Seluruh Karyawan FISIP UNEJ yang pernah membantu penulis selama kuliah.
5. Keluarga Bapak Nanang Hadijanto, “keluarga kedua” penulis yang tiada henti-hentinya mendorong penulis agar segera menyelesaikan skripsinya.
6. Ustadz Ainur Rofiq, Ustadz Nasrul dan ikhwan-ikhwan Ma’had Al-Muslimun antara lain: Mas Agus Dardiri, Qosim, Muharrom, Fuad, Udik, Mas Widya dan Zaky, yang tak henti-hentinya mengajak penulis untuk senantiasa berada di jalan Allah.

7. Rekan-rekan Tim Nasyid Shoutul Ishlah Ponpes Al-Ishlah Bondowoso antara lain Zubair, Shiddiq, Bowo, dan Ulum, *I can't wait our 2<sup>nd</sup> reccord*
8. Anak-anak Kos Jl. Jawa VI no.15 antara lain Edwin KMB, Agoeng Slamet, Tri Minote, Torus, Gopnar, Toni Kecil, Mas Wiwid Jardel, Gerru, Risky Lennon, B'echak, Mas Denny Dobres, Paimo, "Bos" Bambang, Ir-One, dan "Hector" Dayat, *I would never forget all of you guys !*
9. Sahabatku yang tercinta Henry. *Akhirnya aku temukan sosok "teman sejati" pada dirimu. Semoga Allah selalu menjaga ukhuwah yang telah kita bina selama ini.*
10. Anak-anak HI angkatan 1997 tanpa tekecuali, khususnya Mbak Rina, Novie, Winnie. *Thanks for "catatan"-nya*
11. Teman-temanku KKN tahun 2000 kelompok 48 Desa Karang Melok; Jumbo, mbak Saudah, Nunuk, Anis, Oryza, Yosia, Jerry, Singo dan Chrisna. *Don't forget that we're family.*
12. Crew Sinergy Comp; Mas Ferry dan Mas Bisyri, maaf bila selalu merepotkan kalian.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini sangat banyak kekurangannya dan kelemahannya, serta jauh dari sempurna. Olah karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Jember, 13 Mei 2002

Wahyu Akbar Firdaus

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
1.2.1 Batasan Materi.....	8
1.2.2 Batasan Waktu.....	9
1.3 Problematika.....	10
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	11
1.5 Hipotesis.....	21
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.6.1 Tahap Pengumpulan Data.....	23
1.6.2 Tahap Analisis Data.....	23
1.7 Pendekatan.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM OMAN	
2.1 Keadaan Geografi.....	26
2.2 Penduduk.....	27
2.2.1 Keadaan Penduduk.....	27
2.2.2 Program Omanisasi.....	28
2.2.3 Kedudukan dan Peran Wanita di Oman.....	29
2.3 Perekonomian.....	30
2.4 Pendidikan.....	32
2.5 Sejarah Oman.....	33
2.6 Politik Dalam Negeri Oman.....	36



BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI OMAN PADA AWAL PEMERINTAHAN SULTAN QABOOS .....	43
3.1 Ketidakmampuan Politik Isolasi Mengatasi Berbagai Permasalahan di Dalam dan Luar Negeri Oman pada Masa Pemerintahan Sultan Sa'id bin Taimur.....	43
3.2 Pengaruh Sistem Diffuse Bloc.....	46
3.3 Persepsi dan Kepribadian Sultan Qaboos Mengembalikan Kejayaan Oman .....	50
BAB IV POLITIK LUAR NEGERI OMAN DI BAWAH PEMERINTAHAN SULTAN QABOOS (1970-1985).....	56
4.1 Politik Luar Negeri Oman di Tingkat Global.....	56
4.1.1 Hubungan Oman dengan Negara-negara Arab.....	58
4.1.1.1 Oman dan Gulf Cooperation Council.....	59
4.1.1.2 Oman dan Liga Arab.....	61
4.1.2 Keterlibatan Oman dalam Organisasi Internasional.....	64
4.1.2.1 Oman dalam Gerakan Non Blok.....	64
4.1.2.2 Oman dalam Perserikatan Bangsa Bangsa.....	65
4.1.3 Oman dan Amerika Serikat .....	66
4.1.3.1 Dinamika Hubungan Oman dan Amerika Serikat.....	68
4.1.3.2 Kedekatan Oman dan Amerika Serikat Menghadapi Uni Soviet .....	69
4.1.3.3 Facilities Access Agreement Sebagai Sarana untuk Mewujudkan Kepentingan Strategis Oman .....	73
4.2 Netralitas dan Independensi Politik Luar Negeri Oman terhadap Masalah Internasional.....	75
4.2.1 Netralitas Oman terhadap Perang Iran-Irak.....	75
4.2.2 Independensi Oman dalam Perjanjian Camp David.....	77
BAB V KESIMPULAN .....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# BAB I PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Di antara negara-negara teluk, Oman tidak begitu sering disebut dalam publikasi media massa. Negeri ini memang seperti baru terlahir kembali tiga puluh tahun terakhir, setelah sekitar empat puluh tahun terisolasi.

Oman merupakan sebuah negara monarki di sebelah tenggara Semenanjung Arabia; berbatasan dengan Arab Saudi (barat), Uni Emirat Arab (barat laut), Yaman (barat daya), Laut Arab (timur dan selatan), dan Teluk Oman (utara). Luas: 300.000 km<sup>2</sup>. Penduduk: 1.468.000 (1990). Kepadatan penduduk: 5/km<sup>2</sup>, ibukota: Muskat, agama: Islam (86%), bahasa: Arab (resmi), satuan mata uang: Riyal.<sup>1</sup>

Wilayah Oman dapat dikatakan sebagai negara otonom tertua di Arab. Oman pernah dikuasai oleh Portugis pada abad ke-16. Kemudian sejak Abad ke-19, pengaruh Inggris di Oman cukup besar, terutama dalam bidang perdagangan dan perminyakan. Pada tanggal 20 Desember 1951, Oman diakui oleh Inggris sebagai negara merdeka secara penuh, setelah kedua negara itu menandatangani perjanjian persahabatan.<sup>2</sup>

Pada masa kekuasaan Sultan Sa'id bin Taymur (1932-1970), kondisi Oman terlihat buruk. Kucuran minyak yang dihasilkan Oman sejak akhir 1960 tidak dimanfaatkan dengan baik. Sikap Sultan Sa'id yang ortodoks telah melahirkan pembatasan-pembatasan yang tidak perlu bagi rakyatnya, seperti pembatasan pendidikan, kendaraan, keharusan orang berjalan malam dengan

<sup>1</sup> "Oman", dalam *Ensiklopedia Islam 4*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, hal.52

<sup>2</sup> Riza Sihbudi, Zainuddin Djafar, Rahman Zainudin, M.H. Basyar, Amris Hassan, Dhurorudin Mashad, *Profil Negara-negara Timur Tengah*, Pustaka Jaya, Jakarta, hal. 168

lentera, penutupan gerbang kota setiap petang, dan sebagainya.<sup>3</sup> Pembatasan-pembatasan inilah yang menjadikan rakyat kurang senang dengan kebijaksanaan Sultan Said yang ortodoks dan merugikan rakyat.

Oman begitu tertutup dalam berhubungan dengan negara-negara lain di dunia internasional. Praktis hanya Inggris dan India yang menjadi partner kerjasamanya. Di samping itu, Sultan Sa'id pantang untuk berhutang kepada negara lain. Menurut dia, hutang akan menyebabkan kemunduran bagi Oman karena selalu tergantung kepada negara lain. Sehingga dalam tata pergaulan dunia internasional, Oman terisolir. Oman seakan-akan hilang dari peredaran dunia. Yang terjadi kemudian adalah perdagangan dengan dunia luar merosot tajam.<sup>4</sup>

Kebijaksanaan Sultan Sa'id tersebut menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat Oman. Wujud yang lebih konkret dari ketidakpuasan rakyat adalah pemberontakan di selatan Oman yang dilakukan oleh Front Pembebasan Dhufar.<sup>5</sup>

Dengan kondisi yang demikian memprihatinkan, putra Sultan Said yang pernah mengenyam pendidikan militer di Inggris, Qaboos bin Sa'id Al-Bu Said, mengadakan kudeta tak berdarah untuk mengambil alih kekuasaan ayahnya pada tanggal 23 Juli 1970.<sup>6</sup> Alasan Qaboos melakukan tindakan tersebut dikarenakan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan Sultan Sa'id bin Taimur dalam memerintah Oman.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid, hal. 169

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Front Pembebasan Dhufar beranggotakan sekitar 40 sampai 60 orang pada bulan Mei 1965. Walaupun sedikit, Front Pembebasan Dhufar atau Dhufar Liberation Front (DLF) mampu menyelenggarakan kongres pertama di Wadi dan Yadu, perbatasan Oman dan Yaman. Dalam kongres tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menggulingkan kesultanan yang ada dengan menggalang dukungan dari luar negeri. Pemberontakan akhirnya meletus tanggal 9 juni 1965 dengan penyerangan pada pos-pos polisi. Lihat Joseph E. Kechichian, *Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy*, Rand, Santa Monica, California, hal. 162

<sup>6</sup> Nugroho F. Yudho, "Oman: Sejarah Sebuah Negeri Minyak", dalam *Kompas*, 1 Agustus 1995

<sup>7</sup> Joseph E. Kechichian, op.cit., hal. 7

Kenaikan Qaboos menjadi Sultan di Oman disambut gembira oleh rakyatnya.<sup>8</sup> Perubahan yang berarti terutama pembaharuan politik luar negerinya sangat diharapkan dari pemerintahan Qaboos yang baru. Dengan bekal pendidikannya di Inggris diharapkan akan membawa orientasi politik luar negeri yang lebih terbuka dalam berhubungan dengan dunia luar.

Pada awal pemerintahannya, Sultan Qaboos menyatakan bahwa Oman akan mengembangkan politik luar negeri dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip yang *bersahabat dan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain; menghormati hukum internasional; mempererat hubungan dengan negara-negara Arab; dan tidak memihak kepada suatu blok kekuatan.*<sup>9</sup> Dengan prinsip-prinsip tersebut, tampak bahwa Sultan Qaboos menginginkan agar Oman mendapatkan posisi berarti di lingkungan internasional, baik ekonomi maupun politik. Kerjasama dengan negara-negara lain dipandang dapat memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik dan penciptaan lingkungan internasional yang stabil.

Dilihat dari konteks keadaan *internal* Oman yang berupa ketidakstabilan politik dan ekonomi serta keadaan *eksternal* yang meliputi sistem internasional yang terjadi dalam skala global pada tahun 1970-an, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Oman untuk merubah politik luar negerinya pada awal pemerintahan Qaboos. Yang pertama adalah faktor ketidakmampuan politik isolasi dalam menyelesaikan persoalan di

<sup>8</sup> Elly Roosita, "Biar Sultan Asal Bijaksana" dalam *Kompas*, 4 Februari 1995

<sup>9</sup> Joseph E. Kechichian, op.cit., hal. 9. Sampai tahun 1996 tidak ada konstitusi di Oman. Tapi setelah Sultan Qaboos mengalami kecelakaan mobil dan penasehat terdekatnya meninggal, konstitusi Oman mulai ditulis dan dipublikasikan secara meluas. Konstitusi tersebut berisikan hukum yang mengatur kehidupan kenegaraan Kesultanan Oman, termasuk di dalamnya prinsip politik luar negeri. Lihat "Defining the Common Good: Oman as a Model for Global Citizenship", *The Maryland Center for study of History* (online), 2001, (<http://www.geocities.com/collegepark/>, diakses 9 Agustus 2001)

dalam dan luar negeri Oman pada masa Sultan Sa'ïd bin Taimur. Ketertutupan hubungan antara Oman dengan negara-negara lain, khususnya dengan sesama negara Arab pada pemerintahan sebelumnya, mengharuskan Oman untuk memperbaiki citranya di luar negeri. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan politik luar negeri yang terbuka dan kondusif dalam berhubungan dengan dunia internasional.

Faktor yang kedua adalah pengaruh sistem *Diffuse-Bloc*.<sup>10</sup> Sistem ini setidaknya mempengaruhi pemerintahan Oman sebagai negara yang baru saja memulai hubungannya dengan dunia luar setelah sekian lama terisolasi. Oleh karena terhalang oleh realitas internasional yang mana dunia terbagi dalam dua blok yang saling bertentangan dan saling ingin menghancurkan lawannya, maka pada awal pemerintahan Qaboos, Oman berupaya menghindarkan diri dari pengelompokan ke dalam blok-blok tersebut.

Faktor ketiga adalah kepribadian dan persepsi Sultan Qaboos untuk membangkitkan kembali kejayaan Oman. Kepribadian Qaboos yang kuat dan mandiri amat terlihat pada saat ia meng kudeta ayahnya sendiri. Sedangkan persepsinya tentang pentingnya untuk berhubungan dengan dunia luar tercermin pada saat Qaboos mempelajari sejarah kejayaan Oman di masa lalu.<sup>11</sup> Tercatat pada masa lalu, Oman pernah berjaya dan berpengaruh hingga ke Afrika Timur. Ibukota Oman, Muskat, pernah menjadi pusat perdagangan bagi seluruh wilayah Teluk

---

<sup>10</sup> Sistem internasional yang bersifat *Diffuse-Bloc* merupakan sistem internasional yang ditandai dengan adanya persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur, serta munculnya negara-negara dunia ketiga yang baru dan tergabung dalam jajaran Gerakan Non-Blok, yang menentang pembagian dunia ke dalam blok-blok yang ada serta tidak ingin terbawa arus pertentangan antara kedua blok tersebut. Lihat K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Analisa*, Penerjemah Efin Sudrajat dkk, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987, hal.127

<sup>11</sup> Setelah menyelesaikan pendidikannya di Inggris, Qaboos kembali ke Oman untuk mempelajari Islam dan sejarah negaranya, untuk lebih jelasnya lihat "Oman Foreign Affairs" dalam <http://www.omninet.com/tribute.html>, diakses 12 September 2001

Parsi. Bahkan hubungan dagang Oman sudah sampai ke daratan Asia, yaitu Cina.<sup>12</sup>

Selama kepemimpinan Qaboos, Oman gencar melakukan hubungan dengan negara-negara lain dan tidak pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan negara manapun.<sup>13</sup> Dibukanya hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia dan keikutsertaan Oman menjadi anggota Organisasi Internasional di tingkat regional, seperti Liga Arab dan GCC (Gulf Cooperation Council); maupun di tingkat internasional, seperti PBB dan Gerakan Non Blok, dapat membantu Oman untuk melepaskan keterisolasiannya dengan dunia internasional sekaligus dapat berperan aktif dalam proses perdamaian dunia.

Walaupun salah satu dari prinsip-prinsip politik luar negeri diatas disebutkan bahwa Oman tidak memihak pada salah satu blok kekuatan, namun pada realitanya mengharuskan Oman untuk "terpaksa" berpihak kepada salah satu blok dalam pelaksanaan politik luar negerinya, yaitu blok barat pimpinan Amerika Serikat.

Keberpihakan Oman kepada Amerika Serikat disebabkan oleh kepentingan strategis Oman untuk menjaga keamanan wilayah Kesultanan Oman dari ancaman komunisme Uni Soviet. Pemberontakan Popular Front for the Liberation of Oman and the Arabian Gulf (PFLOAG) yang didukung sepenuhnya oleh Uni Soviet merupakan salah satu bukti mengapa Oman berpihak pada salah satu blok yang ada.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Riza Sihbudi, *op.cit.*, hal.171

<sup>13</sup> "Oman and the World", dalam [http://www.etectonics.com/oman/omanworld\\_foreign.asp](http://www.etectonics.com/oman/omanworld_foreign.asp), diakses 23 Januari 2002

<sup>14</sup> Popular Front for the Liberation of Oman and the Arabian Gulf (PFLOAG) adalah front pembebasan berhaluan marxist-leninisme yang juga hasil transformasi dari Dhufar Liberation Front (DLF) yang berusaha untuk menggulingkan Kesultanan Oman sejak pemerintahan Sultan Said bin Taimur. PFLOAG amat didukung oleh Yaman Selatan dan Uni Soviet. Terbukti dengan diberikannya senjata dan pengiriman beberapa anggotanya ke Moscow untuk training militer dan ideologi. Lihat Joseph A. Kechichian, *op.cit.*, hal. 162-163

Kedekatan Oman dengan Amerika Serikat semakin bertambah seiring dengan munculnya permasalahan di kawasan Timur Tengah sepanjang dekade 1980-an. Revolusi Iran, invasi Soviet ke Afghanistan, keamanan Selat Hormuz, perang Iran-Irak, menyebabkan Oman menggantungkan jaminan keamanan negara dan stabilitas kawasan Timur Tengah kepada Amerika Serikat.<sup>15</sup> Seperti yang dikatakan oleh Sultan Qaboos:

The security of the conservative Arab Gulf monarchies facing multi-pronged threats required the military assistance that only the United States was capable and willing to provide.<sup>16</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Oman dan Amerika Serikat untuk menghadapi masalah kawasan teluk adalah penandatanganan Facilities Acces Agreement pada tahun 1980.<sup>17</sup> Perjanjian tersebut merupakan salah bentuk kerjasama militer antara kedua belah pihak untuk mengatasi berbagai isu yang berkembang di kawasan Timur Tengah. Kerjasama ini memberikan imbas bagi Oman untuk turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian Timur Tengah sesuai dengan kepentingan strategis Oman.

Pada akhirnya ketergantungan Oman terhadap Amerika Serikat mulai berkurang ketika Oman memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet pada September 1985. Pembaharuan politik dan ekonomi yang dilakukan Mikhael Gorbachev merupakan alasan Qaboos berhubungan dengan Uni Soviet.<sup>18</sup> Hubungan tersebut memberikan harapan kepada Oman

<sup>15</sup> Calvin H. Allen, Jr., *Oman: the Modernization of the Sultanate*, Westview Press, Colorado, 1987, hal. 118

<sup>16</sup> Joseph E. Kechichian, op.cit. hal 152

<sup>17</sup> Facilities Access Agreement merupakan perjanjian militer yang dilakukan oleh Oman dan Amerika Serikat yang memberikan keleluasaan kepada Amerika Serikat untuk menggunakan fasilitas dan akses di Oman. Untuk lebih lengkapnya lihat Bab IV.

<sup>18</sup> Joseph E. Kechichian, op.cit. hal. 168

agar dapat menerapkan prinsip-prinsip politik luar negerinya secara murni, konsekuen dan tidak selalu menggantungkan jaminan keamanannya kepada salah satu blok. Ini merupakan upaya penting kedepan Oman dalam mengembangkan perdamaian dan keamanan internasional.

Politik luar negeri yang dijalankan Oman selama enam belas tahun pemerintahan Qaboos memunculkan dampak tersendiri bagi Oman. Walaupun berusaha independen dan netral sebagai negara Arab dalam penyelesaian masalah Timur Tengah, namun Oman dianggap memiliki politik luar negeri yang cenderung mendukung kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Salah satu contohnya ketika terjadi isu yang hangat di Timur Tengah antara Arab-Israel.

Lewat GNB (Gerakan Non Blok) dan organisasi lainnya, Oman mendukung upaya penyelesaian konflik Arab dan Israel dengan segera. Dan ternyata sebulan setelah KTT IV GNB di Aljir, Aljazair, September 1973, terjadi konflik terbuka antara beberapa negara Arab dan Israel. Melihat konflik ini, Oman sebagai negara Arab lebih mementingkan penyelesaian secara damai. Tidak mengherankan lagi ketika Mesir berdamai dengan Israel dalam Camp David Accord, yang disponsori oleh Amerika Serikat, Oman mendukung langkah itu. Akibat tindakannya itu, Oman mendapatkan kecaman dari negara Arab lainnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan semua uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberi judul skripsi:

**“Politik Luar Negeri Oman di Bawah Pemerintahan Sultan  
Qaboos (1970-1985) dan Hubungannya dengan Amerika  
Serikat”**

---

<sup>19</sup> Riza Sihbudi, et.al., op.cit., hal.181



## 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam melakukan analisa pada studi Hubungan Internasional, pembatasan ruang lingkup menjadi amat penting, hal ini bertujuan untuk membatasi masalah agar pembahasannya tidak berkembang terlalu luas sehingga keluar dari pokok permasalahan. Bagi penulis pembatasan masalah akan menjadi pedoman kerja, sedangkan bagi pembaca berfungsi untuk mencegah adanya salah pengertian dan keaburan persoalan. Hal ini dikemukakan oleh **Sutrisno Hadi** yang menyatakan:

"Sekali pokok persoalan telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan itu. Bagi penyelidik sendiri penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja, dan bagi orang lain kepada siapa laporan research ini hendak disajikan atau akan diserahkan, penegasan selalu berfungsi mencegah timbulnya kericuhan pendapat dan keaburan persoalan organisasi."<sup>20</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, batasan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah meliputi dua hal, yaitu aspek batasan materi dan batasan waktu.

### 1.2.1 Batasan Materi

Pada pembatasan materi, penulis membahas tentang bagaimana politik luar negeri Oman yang dijalankan pemerintahan Sultan Qaboos setelah mengadakan kudeta tak berdarah terhadap ayahnya sendiri, Sultan Said bin Taimur dalam melepaskan diri dari isolasi Internasional. Materi yang akan dibahas meliputi juga faktor-faktor yang mendorong Qaboos untuk melakukan pembaharuan politik luar negeri pada awal pemerintahannya. Di samping itu, akan dibahas alasan kedekatan Oman dengan Amerika Serikat pada pelaksanaan politik luar negerinya.

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 8

Kedekatan hubungan Oman dengan Amerika Serikat telah menimbulkan kontroversi di kawasan Timur Tengah. Terdapat berbagai penafsiran dalam menterjemahkan fenomena tersebut. Di satu sisi meyudutkan Oman sebagai "antek" Amerika Serikat, di sisi lain menganggap Oman sebagai negara yang memiliki politik luar negeri yang berusaha independen sebagai negara Arab dan netral terhadap penyelesaian masalah di kawasan Timur Tengah.

Batasan materi yang diberikan oleh penulis merefleksikan bagaimana Oman mulai menjalankan politik luar negerinya yang sarat dengan perubahan, dimana yang semula tertutup dengan dunia luar menjadi politik luar negeri yang terbuka dengan negara lain namun terkesan independen dan netral terhadap permasalahan internasional yang ada

**1.2.2 Batasan Waktu**

Pada batasan waktu, penulis akan memulai pembahasan politik luar negeri Oman mulai tahun 1970. Tahun 1970 merupakan masa dimana Sultan Qaboos mulai memerintah Kesultanan Oman. Sejak saat itu, dengan politik luar negeri yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, Sultan Qaboos berusaha menjalin kembali hubungan dengan negara-negara lain di dunia.

Pembahasan materi akan dibatasi sampai dengan tahun 1985. Tahun tersebut merupakan saat dimana Oman akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Dalam enam belas tahun pemerintahan Qaboos, Oman menganggap Uni Soviet sebagai musuh yang dapat membahayakan keamanan Kesultanan Oman. Oleh karena itu Oman cenderung berpihak kepada Amerika Serikat dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

### 1.3 Problematika

Problematika atau permasalahan merupakan hal yang mendasar yang harus dibuat dalam setiap penelitian ilmiah. Perumusan masalah akan dapat membantu dalam memberikan pencarian fokus pembahasan.

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan problematika atau permasalahan, sebaiknya kita ikuti pendapat para pakar penelitian tentang hal tersebut.

Dalam hal ini **Winarno Surachmad** memberikan pengertian masalah sebagai berikut:

Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dianalisa sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kita terus jalan <sup>21</sup>

Hal itu juga selaras dengan Pendapat **Muhammad Hatta** sebagaimana dikutip oleh **The Liang Gie**, yang menyatakan:

Masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahuinya lebih mendalam. Masalah menimbulkan soal yang harus diterangkan oleh ilmu. Ilmu senantiasa mengemukakan pertanyaan: bagaimana (duduknya) dan apa sebabnya. <sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka masalah yang relevan dengan tema karya tulis ini adalah:

*Mengapa dalam pelaksanaan politik luar negeri Oman selama enam belas tahun pemerintahan Sultan Qaboos cenderung berpihak kepada Amerika Serikat?*

<sup>21</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research :Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV. Tarsito, Bandung, 1975, hal. 33

<sup>22</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian kedudukan, Lingkup dan Metodologi*, Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta, 1984, hal. 49

#### 1.4 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori sangatlah diperlukan dalam setiap penelitian ilmiah. Kerangka dasar teori merupakan konsepsi umum penulisan karya tulis ilmiah dalam memberikan gambaran dan analisa masalah umum yang berhubungan dan terikat.

Menurut **Charles A. Mc Clelland**, "Teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan, atau juga merupakan seperangkat pernyataan mengenai keadaan yang diharapkan."<sup>23</sup>

Sementara **Quincy Wright** mendefinisikan teori sebagai berikut:

Suatu kumpulan yang komprehensif, koheren, dan berhubungan yang memberikan sumbangan bagi penalaran secara pribadi, evaluasi dan kontrol dalam hubungan antara negara dan kondisi dunia.<sup>24</sup>

Berangkat dari dua pendapat para ahli tersebut, penulis mendasarkan pada **Decision Making Theory** (Teori Pembuatan Keputusan).

**Richard C. Snyder, H.W. Bruck, dan Burton** mendefinisikan Decision Making sebagai berikut :

Decision Making di dapatkan dari serangkaian alternatif urutan tindakan yang diseleksi dari sejumlah yang terbatas yang ditetapkan secara sosial, dari suatu proyek untuk melahirkan keadaan peristiwa yang khusus pada masa mendatang oleh para pembuat keputusan. Essensi dari setiap pembuatan keputusan adalah memilih diantara berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan suatu bangsa.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Charles A. McClelland, *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Sistem*, terjemahan Mien Joebhaar dan Ishak Zahir CV. Rajawali Press, Jakarta, 1981, hal.10

<sup>24</sup> Quincy Wright, *A Study of International Relation dalam Teori Hubungan Internasional*, FISIP-UGM, Yogyakarta, 1987, hal. 28

<sup>25</sup> Richard C. Snyder, et.al., *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Relation*, The Free Press, New York, 1962, hal. 90

Adapun maksud utama penelaahan proses Decision Making adalah untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah proses keputusan mempengaruhi keputusan yang dihasilkan.<sup>26</sup>

Untuk lebih memperjelas hal diatas, penulis menggunakan model pembuatan keputusan. **Graham T. Allison**<sup>27</sup> mengajukan 3 model dalam menganalisa politik luar negeri untuk mendiskripsikan proses keputusan luar negeri, yaitu:

#### **Model I : Aktor Rasional**

Dalam model ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan sebagai perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dengan demikian, analisa politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan terhadap keputusan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan, kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif tersebut.

Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijakannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa

---

<sup>26</sup> A. Eby Hara, "Decision Making Theory dalam Studi Hubungan Internasional: Suatu Upaya Teorisasi," dalam *Jurnal Ilmu Politik* 9, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 20

<sup>27</sup> Graham T. Allison, dalam Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi*, LP3S, Jakarta, 1990, hal..243

melakukan penelusuran tuntas terhadap semua sumber yang bisa dicapai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

### **Model II : Proses Organisasi**

Model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan politik luar negeri bukan semata-mata proses intelektual, tetapi lebih merupakan *proses mekanis* yaitu pembuatan keputusan dilakukan secara mekanis merujuk pada keputusan. Keputusan yang telah dibuat pada masa lalu, pada preseden, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu. Seperti yang ditulis oleh Allison ketika ia membahas model proses organisasi ini, apa yang akan terjadi pada suatu waktu bisa diramalkan dengan melihat apa yang telah terjadi pada waktu sebelumnya.

Model ini mempunyai tiga proposisi. *Pertama*, suatu pemerintah yang terdiri dari sekumpulan organisasi yang secara longgar bersekutu dalam struktur yang berhubungan yang mirip struktur feodal. *Kedua*, keputusan dan perilaku pemerintah bukan hasil dari proses penetapan pilihan secara rasional, tetapi sebagai output atau hasil kerja sejumlah organisasi besar yang bekerja menurut suatu pola perilaku baku. *Ketiga*, setiap organisasi yang memiliki prosedur kerja baku dan program serta bekerja secara rutin, umumnya akan berperilaku sama seperti perilakunya dari masa sebelumnya

Unit analisa dari model ini adalah output-output organisasi pemerintahan, oleh karena itu kita harus mengidentifikasi lembaga-lembaga mana yang melahirkan tindakan politik itu.

### **Model III : Politik Birokratik**

Dalam model ini, politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil proses intelektual yang menghubungkan cara rasional. Politik luar negeri adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan diantara berbagai aktor dan organisasi. Ini melibatkan berbagai permainan tawar-menawar (Bargaining Games) di arena politik nasional. Dengan kata lain pembuatan keputusan politik luar negeri adalah *proses sosial* bukan proses intelektual.

Perilaku aktor dalam model ini adalah hasil dari "permainan politik" dalam membuat dan menerapkan keputusan tersebut. Karena itu yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian dengan tujuan yang seharusnya dikejar oleh pemerintah.

Dalam hal ini, untuk menganalisa perubahan politik luar negeri Oman dan kecenderungannya untuk berpihak kepada kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, penulis menggunakan **Model I**, yaitu **Aktor Rasional**. Pembaharuan politik luar negeri yang dilakukan Oman di bawah pemerintahan Sultan Qaboos merupakan suatu pilihan tindakan yang rasional dan layak untuk dilakukan. Kegagalan politik isolasi dalam mengatasi permasalahan di dalam dan luar negeri Oman pada masa pemerintahan sebelumnya, menjadikan Sultan Qaboos sebagai Decision Maker mencari alternatif haluan kebijakan yang terbuka dan lebih kondusif bagi kesinambungan Oman di masa depan. Dari kebijakan luar negeri yang diambil tersebut, menunjukkan adanya pertimbangan tujuan besar yang ingin dicapai yaitu agar Oman dapat berperan aktif di dalam hubungan internasional.

Sedangkan keputusan Oman untuk lebih dekat dengan salah satu blok, Amerika Serikat, walaupun terkesan menyimpang

dari salah satu prinsip luar negerinya, juga merupakan tindakan rasional Qaboos sebagai upaya menyesuaikan diri dengan situasi internasional yang berkembang saat itu. Oman dengan kekuatan militer relatif kecil merasa belum mampu menjaga keamanan wilayahnya untuk menghadapi ancaman dari salah satu blok yang ada, Uni Soviet. Uni Soviet merupakan ancaman langsung terhadap eksistensi Kesultanan Oman. Untuk itu Oman perlu mencari "partner" blok yang mampu untuk menjadi pelindungnya, yaitu Amerika Serikat.

Aktor rasional yang paling berperan dalam pembuatan keputusan adalah Sultan Qaboos. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Oman, Sultan Qaboos bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Disamping itu pula, dia juga bertindak sebagai ketua Dewan Pembangunan Nasional dan Kabinet yang beranggotakan beberapa orang yang diangkat oleh Sultan. Titah Sultan menjadi kebijakan kabinet. Keputusan hukum dan dekrit adalah hak Sultan. Semua perjanjian Internasional dan persetujuan lainnya akan berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Sultan.<sup>28</sup>

Selain teori diatas, penulis juga mendasarkan pada konsep **Kepentingan Nasional** sebagai kerangka analisa politik luar negeri Oman. Jika dikaitkan dengan Model I Pengambilan Keputusan, kepentingan nasional merupakan salah satu hal yang tidak dipisahkan dengannya. Secara normatif politik luar negeri Oman memang dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kepentingan Kesultanan Oman. Walaupun dirasa sangat "terpaksa" untuk tidak berpihak pada salah satu blok yang

---

<sup>28</sup> Riza Sihbudi, et.al., op.cit., hal.174



ada, Amerika Serikat, demi keberlangsungan kehidupan kesultanan Oman, kepentingan nasional haruslah diabdikan.

Faktor yang berpengaruh dalam pencapaian kepentingan nasional masa pemerintahan Sultan Qaboos adalah interaksi Oman dengan negara-negara lain dalam sistem Internasional. Secara teoritis, interaksi antar aktor dalam sistem internasional dapat bersifat *kerjasama* dan *konflik*. Sebagai bagian dari usaha untuk mencapai kepentingan nasional maka strategi yang seharusnya dilakukan oleh Oman melalui politik luar negerinya adalah bagaimana menjalin kerjasama erat dengan aktor yang lain khususnya Amerika Serikat, dan bagaimana mengeleminasi dampak-dampak negatif dari konflik antar negara di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Oman.

Konsep kepentingan nasional memang menjadi bahan perdebatan di antara para ahli hubungan internasional. Ini didasarkan atas asumsi bahwa semua alasan negara untuk melaksanakan politik luar negerinya selalu dilandaskan kepada kepentingan nasional.

Dalam hal ini penulis lebih mengacu pada pendapat **Paul Seabury**. Paul Seabury mengatakan bahwa:

Ide kepentingan nasional mungkin mengacu pada serangkaian tujuan *ideal* yang seharusnya *diusahakan* untuk diwujudkan oleh suatu bangsa dalam tindak hubungan luar negerinya. Dengan istilah yang lebih baik, kita mungkin dapat menyebutkannya konsep kepentingan nasional yang bersifat *normatif* <sup>29</sup>

Kepentingan nasional suatu negara dapat dibedakan menjadi lima, yaitu *kepentingan Strategis*, yang mencakup pertahanan keamanan teritorial negara serta usaha untuk

---

<sup>29</sup> Paul Seabury, *Power, Freedom, and Diplomacy: The Foreign Policy of the United States of America*, Random House, New York, 1963, hal.86

menjaga perimbangan kekuatan baik global maupun regional yang menguntungkan; *kepentingan politik*, yang mencakup upaya untuk memelihara kekuasaan; *kepentingan ekonomi* yang mencakup upaya untuk memelihara distribusi kekayaan internasional yang seadil-adilnya; *kepentingan hukum*, yang mencakup usaha untuk memelihara perjanjian internasional yang menjamin hak-hak setiap negara, dan; *kepentingan ideologis* yang mencakup upaya menyebarluaskan falsafah hidup atau ideologi politik serta upaya menangkal pengaruh negatif yang datang dari luar.<sup>30</sup>

Dalam mencermati permasalahan yang ada, penulis lebih menekankan pada *kepentingan strategis* dengan tidak mengabaikan kepentingan-kepentingan nasional yang lain. Kedekatan Oman dengan Amerika Serikat didasarkan pada upaya Oman untuk menghalau ancaman komunisme Uni Soviet terhadap keamanan wilayah Oman. Di samping itu, kepentingan strategis Oman tersebut dimaksudkan sebagai upaya Oman untuk berperan aktif dalam menjaga perimbangan kekuatan regional dalam proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Untuk menyelamatkan posisinya dari isu berkembang di sekitar wilayah negaranya, Oman melakukan perjanjian militer dengan Amerika Serikat. Perjanjian militer tersebut diharapkan akan membantu Oman dalam menahan tekanan dan serangan yang dapat mengarah ke wilayah negaranya. Dengan begitu, negara-negara Arab setidaknya akan menaruh respek terhadap posisinya yang khusus dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan untuk lebih mempertajam analisa permasalahan mengapa dalam pelaksanaan politik luar negeri Oman cenderung

---

<sup>30</sup> F.S. Northedge, *The International Political System*, Faber and Faber, Boston, 1981, hal 38 dalam Muhammad Yun'am, *Kemenangan Khatami dalam Pemilu 1997: Implikasinya bagi Politik Luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat*, Skripsi S1, FISIP, Universitas Jember, Jember, hal. 85

berpihak kepada Amerika Serikat, penulis menggunakan pola adaptasi politik. Dalam hal ini **Rosenau**<sup>31</sup> mengajukan 4 (empat) pola adaptasi politik suatu negara untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan internal dan lingkungannya, antara lain:

### **1. The Politics of Acquiescent Adaptation**

Ciri utamanya adalah kesiapan untuk menyesuaikan tingkah laku dalam masyarakatnya pada tuntutan yang berasal dari lingkungan luar, biasanya dari negara adidaya. Mereka umumnya tidak mampu untuk menolak atau menawar tuntutan dari luar itu.

### **2. The Politics of Intransigent Adaptation**

Ciri utama model ini adalah kesiapan masyarakat untuk mengubah lingkungan luarnya, supaya mereka sesuai dengan tuntutan yang melekat dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, dalam situasi apapun masyarakat tidak akan mengubah sikap interennya yang menonjol dalam menanggapi tuntutan yang berasal dari luar lingkungannya.

### **3. The Politics of Promotive Adaptation**

Ciri utamanya adalah kebebasan memilih. Mereka secara relatif bebas mengadakan perubahan di dalam dan di luar yang akan menuju pada keseimbangan baru yang diinginkan antara struktur masyarakat dan lingkungannya pada suatu waktu. Keseimbangan yang diinginkan berasal dari penafsiran terhadap nilai dasar dan tujuan jangka panjang dari masyarakatnya.

### **4. The Politics of Preservative Adaptation**

Model ini bercirikan konflik dan tuntutan bertentangan yang bersumber dari dalam dan luar. Tuntutan ini sangat kuat sehingga pemimpin dalam masyarakat preservative harus mengadakan

---

<sup>31</sup> James N. Rosenau dalam Akhmad Khusyairi, *Politik Luar Negeri Australia di Bawah Pemerintahan Gough Whitlam (1972-1975) dan Hubungannya dengan Indonesia*, Desertasi tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995, hal. 25-26

tawar-menawar agar bisa memelihara keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan yang ada.

Jika merujuk pada salah satu prinsip luar negeri Oman yang tidak memihak pada salah satu blok kekuatan, sampai pada akhirnya memihak salah satu blok yang ada, Amerika Serikat, penulis mendasarkan pada **The Politics of Promotive Adaptation** daripada pola-pola adaptasi politik yang lain.

Dalam menjalankan politik luar negerinya yang sarat dengan perubahan, tidak sepenuhnya Sultan Qaboos dapat mewujudkan prinsip-prinsip politik luar negerinya dengan mudah. Sebagai negara Arab dengan kekuatan ekonomi dan militer yang kecil serta masih belum memiliki lobi internasional yang kuat, mau tidak mau Oman harus mengadaptasikan prinsip-prinsip politik luar negerinya dengan berbagai kondisi termasuk hambatan yang ada di luar negerinya untuk tujuan jangka panjang Oman.

Ketidakterpilihannya Oman pada blok-blok kekuatan yang ada harus berubah menjadi keberpilihannya Oman pada blok Barat. Oman yang merupakan sebuah negara dengan letak geografis yang strategis namun berada dalam kawasan yang rawan konflik regional, merasa mendapat ancaman langsung dari salah satu blok yang ada, Uni Soviet. Oleh karena itu Qaboos mempertimbangkan untuk meninggalkan strategi nonblok pada dan memilih untuk meminta bantuan militer kepada Amerika Serikat yang mau menawarkan perlindungan.

Selain penggunaan teori untuk menganalisa permasalahan, penulis menekankan pada analisa sistematis atau "induksionis". Dalam hal ini, yang menjadi *unit analisisnya* adalah kebijakan luar negeri Oman dan yang menjadi *unit eksplanasinya* adalah sistem regional dan global. Analisa sistematis tersebut membantu penulis dalam menjelaskan bahwa yang dilakukan Oman di bawah pemerintahan Qaboos (unit analisa negara-bangsa) sebenarnya

konteks sistem internasional dan regional Timur Tengah (unit eksplanasi).

Di samping hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis juga menggunakan konsep-konsep yang lain untuk lebih memperjelas pembahasan. Menurut **Mohtar Mas'oeed**, "Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu."<sup>32</sup>

Beberapa konsep politik yang dapat membantu untuk mendiskripsikan hal-hal yang berkenaan dengan penulisan karya ilmiah di atas, antara lain:

### **1. Perubahan Politik Luar Negeri**

- a. *Perubahan* merupakan suatu penggantian berkaitan dengan perbedaan waktu dan identitas yang mapan.<sup>33</sup>
- b. *Perubahan Politik* adalah transformasi struktur, proses atau tujuan-tujuan yang mempengaruhi distribusi dan penggunaan kekuasaan yang memerintah dalam masyarakat.<sup>34</sup>
- c. *Politik Luar Negeri* adalah suatu strategi atau rencana tentang tindakan yang dikembangkan atau diambil oleh para pembuat keputusan (Decision Makers) yang dimiliki oleh negara, dalam berhadapan dengan bangsa-bangsa lain dalam pergaulan internasional, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan nasional suatu negara.<sup>35</sup>

Dari tiga definisi konsep diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan politik luar negeri Oman bisa terjadi karena

<sup>32</sup> Mohtar Masoed, op.cit., hal 164

<sup>33</sup> Robert A. Nisbet, *The Social Bond an Introduction to the Study of Society*, Alfred A. Knoff Inc., New York, 1979, hal. 302

<sup>34</sup> Jack C. Plano, Roberts Eriggs, Helenan S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 162

<sup>35</sup> Ibid, hal. 48

penyesuaian sistem internasional terhadap tuntutan baru dan perubahan lingkungan internasional atau karena sistem yang ada di Oman yang dikenal tertutup pada dunia luar pada masa Sultan Said tidak mampu lagi dipertahankan sehingga perlu diganti dengan sistem lain yang lebih terbuka dan kondusif.

## **2. Isolasi**

Isolasi merupakan keadaan yang menggambarkan situasi yang menuntut suatu negara agar pemerintahan membatasi hubungan dengan negara lain, khususnya hubungan politik hingga taraf paling minimum.<sup>36</sup>

Dalam hal ini, Sultan Said yang bisa kita sebut sebagai isolasionis, mendasarkan pada asumsi bahwa negaranya, Oman, dapat mencapai keamanan dan kemerdekaan dengan mengurangi transaksi dengan unit politik lain dalam sistem itu, atau dengan memelihara hubungan diplomatik dan perdagangan luar negeri.

Namun dengan adanya politik isolasi pada masa Sultan Said, semakin membuat Oman menjadi terkucilkan dalam pergaulan dengan negara-negara Timur Tengah pada khususnya dan dunia Internasional pada umumnya. Dan ini akan membuat Oman kesulitan untuk membangun negaranya.

### **1.5 Hipotesis**

Hipotesis disusun untuk memberikan jawaban sementara yang dalam analisa lebih lanjut perlu dibuktikan kebenarannya. Dalam proses selanjutnya, hipotesa akan diverifikasi untuk mendapatkan kesimpulan yang sebenarnya. Hipotesa amat dibutuhkan untuk menemukan alternatif dari berbagai dugaan yang mendekati kebenaran.

---

<sup>36</sup> Michael A. Riff, *Kamus Ideologi Politik Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal.162

**Winarno Surachmad** menyatakan, "Hipotesis merupakan perumusan jawaban sementara dalam suatu penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya."<sup>37</sup>

Dalam hal ini maka hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan diatas adalah:

*Oman cenderung berpihak kepada Amerika Serikat di Timur Tengah dalam pelaksanaan politik luar negerinya dikarenakan kepentingan strategis Oman dalam mempertahankan keamanan teritorial negaranya dari ancaman komunis Uni Soviet serta menjaga keseimbangan kekuatan regional dari permasalahan kawasan yang berkembang di Timur Tengah.*

### 1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, metode merupakan salah satu syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Metode tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik penulisannya. Dengan diterapkannya suatu metode mempunyai manfaat untuk mendapatkan suatu kerangka berpikir dan data-data yang dibutuhkan secara memadai agar karya tulis memiliki bobot ilmiah.

Secara umum, pengertian metode menurut **Winarno Surachmad** adalah sebagai berikut:

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji rangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikannya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Winarno Surachmad, op.cit hal. 33

<sup>38</sup> Ibid, hal. 121

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode atau cara yang mencakup:

#### **1.6.1 Tahap Pengumpulan Data**

Dalam mencari data, penulis lebih banyak mengambil data sekunder, karena untuk memperoleh data primer penulis menghadapi berbagai kendala antara lain terbentur pada masalah letak geografis, sumber data primer yang jauh, faktor bahasa, tenaga dan dana.

Selain itu penulis juga mengambil data-data dari buku teks, internet, jurnal ataupun sumber lain yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis melakukan penelitian ke berbagai perpustakaan antara lain:

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
3. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta
4. Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta
5. Internet

#### **1.6.2 Tahap Analisis Data**

Apabila data yang diperlukan telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisa data yang telah diperoleh tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan cara berpikir deduktif. Menurut **Mohtar Mas'ood** cara berpikir deduktif adalah:

Menarik prinsip umum dengan menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah sehingga sesudahnya kita bisa menguji masing-masing proposisi dengan menelaah peristiwa-peristiwa khusus untuk melihat apakah kasus itu



bisa dijelaskan dengan diramalkan dengan teori-teori yang telah ditetapkan.<sup>39</sup>

Dengan data-data yang ada serta menggunakan berpikir seperti diatas penulis akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan politik luar negeri Oman di bawah pemerintahan Sultan Qaboos serta alasan kedekatannya dengan Amerika Serikat, akhirnya dapat diketahui kebenaran hipotesisnya.

### 1.7 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam karya tulis ini adalah untuk mempertajam analisa sehingga hasil penelitian itu dapat dilihat dari sudut yang lebih spesifik **The Liang Gie** mengatakan bahwa :

Pendekatan adalah keseluruhan sikap penyelidikan, sudut pandang, ukuran, pangkal duga, dan kerangka dasar pemikiran yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran dan memahami pengetahuan yang teratur dan bulat mengenai sasaran dan telaah.<sup>40</sup>

Berdasarkan hal diatas, pendekatan yang relevan untuk digunakan adalah Pendekatan Sejarah Politik (political history approach). **The Liang Gie** menjelaskan bahwa:

Pendekatan sejarah politik adalah menerapkan hamparan sejarah dan menggunakan pengetahuan tentang masa lampau apabila menafsirkan pertumbuhan gejala-gejala politik pada masa kini maupun masa depan yang mungkin terjadi.<sup>41</sup>

Pendekatan sejarah politik merupakan kajian tentang kejadian-kejadian masa lampau yang terutama berkaitan dengan

---

<sup>39</sup> Mohtar Mas'oed, op.cit., hal. 80

<sup>40</sup> The Liang Gie, op.cit hal.82

<sup>41</sup> Ibid, hal 87

kisah peristiwa yang muncul secara berurutan. Atau sebagai upaya menciptakan suatu penggalan sejarah dalam mencari jawaban 'mengapa' sehingga kesinambungan tempo dulu dan sekarang dapat dipastikan dan dipertalikan.<sup>42</sup>

Jadi pendekatan sejarah politik diatas dimaksudkan sebagai referensi bagi kebijakan luar negeri Oman di bawah pemerintahan Sultan Qaboos sebagai jawaban dari ketidakberhasilan politik isolasi dalam mengatasi permasalahan dan dalam negeri pada masa pemerintahan Oman sebelumnya.

---

<sup>42</sup> Jack C. Plano, et.al., op.cit., hal. 104

## BAB II GAMBARAN UMUM OMAN



### 2.1 Keadaan Geografi

Oman merupakan negara ketiga terluas di semenanjung Arabia dengan jarak utara-selatan 805 km, timur-barat 644 km, dan garis pantai sekitar 1.700 km. Wilayah Oman terletak antara daerah kosong gurun pasir luas Rub al-Khali (Arab Saudi) dan laut Arab serta teluk Oman. Tanah di Oman umumnya berbatu-batu dan berpasir, akan tetapi mengandung minyak sebagai sumber pendapatan terbesar negara itu.<sup>43</sup>

Wilayah Oman terdiri dari: dataran pantai yang luas sepanjang 240 km di bagian utara (disebut al-Batina), merupakan daerah padat penduduk dan daerah pertanian yang memiliki sejumlah kota pelabuhan seperti Suhar, al-Khabura, Suwayq, Masna'a, Birka dan Sib; daerah Hajar as-Syarqi di bagian tengah, merupakan daerah pertama yang didiami pada masa silam dan asal peradaban orang-orang Oman, termasuk rangkaian pegunungan al-Hajar yang membentuk garis paralel menembus pantai dan menghubungkan laut bagian timur Muskat dan daerah Ras al-Hadd, pegunungan yang mencapai ketinggian 3.000 meter pada Jabal al-Akhdar; daerah Ghadaf di timur dengan kota-kota Rustaq, Awabi, Iffi, dan Nakhl; daerah Dhofar di selatan, merupakan suatu daratan pantai yang sempit dengan tiga kota, Rasyut, Salala, dan Mirbat; daerah ibukota; Pulau Masirah; dan Hajar Agarbi dengan kota-kota Dhank, Yanqul, Ibri, Jawf, Nizwa, Bahla, Izki, dan Manah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> "Oman", *Encyclopedia of Knowledge*, Grolier Inc., Connecticut, 1991, hal. 89

<sup>44</sup> Ensklopedi Islam, op.cit., hal.52

Oman beriklim gurun dengan tingkat kelembaban yang tinggi di daerah pantai. Oman juga merupakan salah satu negara terpanas di dunia, dengan temperatur antara 18-34°C. Pada musim panas bisa mencapai 54,4°C. Curah hujan rata-rata 50-100 mm/tahun, kecuali di Dhofar (sekitar 630 mm/tahun).<sup>45</sup>

Oman merupakan sebuah negara monarki di sebelah tenggara semenanjung Arabia; berbatasan dengan Arab Saudi (barat), Uni Emirat Arab (barat laut), Yaman (barat daya), Laut Arab (timur dan selatan), dan teluk Oman (utara). Luas: 300.000 km<sup>2</sup>.

## **2.2 Penduduk**

### **2.2.1 Keadaan Penduduk**

Penduduk Oman terdiri dari berbagai etnis, dengan mayoritas Arab (77%), yang dapat dibedakan atas berbagai suku. Kelompok etnis sebagai minoritas antara lain India, Pakistan (Balukhistan), Persia, dan Afrika. Sekitar 90% hidup di pedesaan, diantaranya sebagian masih mempertahankan hidup nonmadik. Agama utama Islam dengan penganut 86%, terdiri dari pengikut golongan al-Ibadiyyah (salah satu cabang Khawarij, aliran islam radikal dari masa permulaan Islam), serta muslim Suni dan Syiah sebagai minoritas. Sisanya Hindu dan lain-lain. <sup>46</sup>

Penduduk Oman diperkirakan berjumlah 1.643.579 jiwa, dengan angka pertumbuhan rata-rata 3,46%. Rata-rata kelahiran sebesar 40,56/1.000 penduduk, dengan rata-rata kematian 5,94/1000 penduduk. Harapan hidup penduduk rata-rata 67,32

---

<sup>45</sup> "Oman", *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990, hal.272

<sup>46</sup> *Ensklopedia Islam*, op.cit hal. 53

tahun: laki-laki 65,47 tahun dan perempuan 69,27 tahun. Di Oman rata-rata seorang perempuan melahirkan 6,58 anak.<sup>47</sup>

Dengan kondisi yang demikian, persoalan kependudukan akan menjadi penghalang bagi Oman di kemudian hari jika tidak ditangani secara dini.

### **2.2.2 Program Omanisasi**

Latar belakang warga Oman yang terdiri dari berbagai macam asal penduduk itu akan mewarnai dinamika kehidupan disana. Para pendatang yang umumnya siap "bertempur" akan lebih memenangkan kehidupan sehari-hari. Menyadari hal ini dan untuk meningkatkan peran warga asli Oman, Sultan Qaboos mencanangkan apa yang disebut sebagai "Omanisasi".

Menurut Ahmed bin Abdulnadi Macki, menteri Aparatur Negara Oman pada tahun 1994, menyatakan bahwa Omanisasi adalah menempatkan tenaga Oman yang terlatih dan andal pada posisi-posisi yang kini diduduki tenaga asing. Jadi bukan hanya mengganti tenaga asing dengan orang Oman.<sup>48</sup>

Alasan pemerintah membuat kebijakan Omanisasi tidak lain adalah untuk menghadapi ledakan kaum muda Oman, mengurangi tenaga asing, dan memberi peluang kepada penduduk Oman sendiri. Hal ini mengingat kebutuhan pencari kerja baru yang kian besar. Diperkirakan lebih dari setengah jumlah penduduk Oman (sekitar 1,5 juta) adalah berumur di bawah 15 tahun.<sup>49</sup>

Dengan program Omanisasi ini, para tenaga ahli asing akan semakin berkurang perannya. Demikian pula peran keluarga pedagang yang umumnya pendatang atau keturunan pendatang

---

<sup>47</sup> Riza Sihbudi, et.al., op.cit hal.167-168

<sup>48</sup> "Oman dan Omanisasi" dalam *Kompas* 4 Februari 1995

<sup>49</sup> Riza Sihbudi, et.al., op.cit., hal.171

dari luar Oman. Rakyat Oman yang diuntungkan dengan adanya program Omanisasi ini akan semakin menghormati Sultan.

### **2.2.3 Kedudukan dan Peran Wanita di Oman**

Oman merupakan salah satu di antara sedikit negara Arab yang memberikan kepada wanita haknya untuk turut serta tampil dalam pentas politik. Kuwait, misalnya, yang sebagian besar anggota parlemennya dipilih langsung, belum memberikan hak memilih bagi wanita. Menurut Gubernur Muscat, Baghash bin Said al said bahwa langkah ini mencerminkan kepercayaan wanita Oman dan mempersilakan mereka untuk andil lebih luas dalam pembangunan negara.<sup>50</sup>

Sejak Sultan Qaboos berkuasa, perhatian kepada hak-hak wanita cukup besar. Peranan wanita Oman di berbagai bidang menjadi nyata. Salah satu pembaca berita radio wanita menjadi anggota Majelis As Shura.<sup>51</sup>

Tahun 1970, saat Sultan mulai berkuasa, di Oman hanya ada tiga buah sekolah yang seluruhnya untuk laki-laki. Setelah 24 tahun, jumlah sekolah menjadi 920 buah yang sebagiannya untuk sekolah perempuan. Dengan sistem sekolah yang terpisah antara wanita dan pria, sesuai dengan budaya mereka yang diilhami oleh ajaran Islam, Oman memberi kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Bahkan, 60% mahasiswa Universitas Sultan Qaboos adalah Wanita.<sup>52</sup>

Jadi kesempatan wanita Oman untuk mengaktualisasikan dirinya di luar peran tradisionalnya sebagai ibu rumah tangga mulai terbuka luas sejak pertengahan tahun 1970an. Kesempatan

<sup>50</sup> Riza Sihbudi, et.al., op.cit., hal.176

<sup>51</sup> "Defining the Common Good: Oman as a Model for Global Citizenship", *The Maryland Center for study of History* (online), 2001, (<http://www.geocities.com/collegepark/>, diakses 9 Agustus 2001)

<sup>52</sup> Kompas, 4 Februari 1995, op.cit.

ini tampaknya akan semakin berkembang seiring dengan program Omanisasi yang telah dicanangkan oleh Sultan Qaboos. Keinginan untuk mandiri sebagai bangsa mengisyaratkan agar rakyat Oman mempersiapkan diri untuk menggantikan peran yang sebelumnya dipegang oleh tenaga asing.

### **2.3 Perokonomian**

Bagi pemerintahan Oman, minyak merupakan sumber perkonomian Oman yang dapat menyumbang sekitar 85% penghasilan tahunan pemerintah. Cadangan minyak bumi Oman berkisar antara 350 juta metrik ton, dan gas alam 76.450.000.000 m<sup>3</sup>. Harus diakui bahwa dalam sektor pembangunan, minyak memberikan andil terbesar bagi perekonomian Oman. Penerimaan dari sektor minyak sekitar 35% produk Domestik bruto (PDB), tetapi angkatan kerja yang terserap hanya 2,1% atau 9.700 orang.<sup>53</sup>

Meskipun sudah diusahakan adanya diversifikasi ekonomi, kemakmuran Oman masih tetap tergantung pada ekspor gas serta minyak.<sup>54</sup> Sejak tahun 1970 penghasilan dari minyak digunakan untuk membangun jalan, perluasan irigasi, penyediaan listrik, industri dan sarana lainnya.<sup>55</sup>

Dalam masa pemerintahannya tersebut, Sultan Qaboos berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas. Tanpa disadari pengeluaran pemerintah, terutama untuk sektor pembangunan meningkat pesat, sedangkan penerimaan dari sektor minyak relatif tetap. Oleh karena itu perlu adanya

---

<sup>53</sup> Ensiklopedia Nasional Indonesia, op.cit., hal.275

<sup>54</sup> Riza Sihbudi, et.al., op.cit., hal.170

<sup>55</sup> Encyclopedia of Knowledge, op.cit., hal. 90

penggalian sumber pendapatan yang lain, misalnya pertanian, perikanan dan sektor pariwisata.

Untuk sektor pariwisata, Oman baru mengembangkan sektor ini pada sekitar tahun 1986. Jika dibandingkan dengan negara teluk lainnya, Oman tergolong "new comer" dalam sektor pengembangan ini.<sup>56</sup>

Berbeda dengan negara teluk lainnya, pendekatan Oman pada sektor pariwisata tersebut lebih "lunak". Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh wisatawan yang "berkualitas".<sup>57</sup> Pada dasarnya Oman tidak menghendaki wisatawan datang langsung banyak, sementara masyarakatnya belum siap menerima jumlah itu. Mereka ingin mengembangkan pariwisata, akan tetapi tetap menjaga keadaan lingkungan masyarakatnya.

Jumlah wisatawan dari tahun ke tahun terus meningkat. Antara Oktober 1986-April 1987, wisatawan yang masuk ke Oman berkisar antara 1.500 wisatawan. Kemudian meningkat menjadi kurang lebih 5.000 orang saat liburan berikutnya. Jumlah ini terus meningkat lagi menjadi 8.500 orang wisatawan asing pada tiga tahun selanjutnya.<sup>58</sup>

Krisis teluk tahun 1990-1991 turut mempengaruhi jumlah wisatawan ke Oman. Wisatawan yang datang turun menjadi 3.800 orang. Namun pada tahun 1993 kembali naik drastis mencapai 34.000 wisatawan. Bahkan penghasilan hotel pada tahun tersebut berjumlah OR 31,8 juta. Hal ini berarti naik menjadi 22% dibandingkan tahun 1991.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Riza Sihbudi, et.al., op.cit., hal 172

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Ibid, hal.173

<sup>59</sup> Ibid



Fenomena diatas menunjukkan bahwa dengan dikembangkannya sektor pariwisata di Oman sebagai akibat dari dibukanya hubungan dengan dunia luar, memberikan dampak yang besar dan positif bagi Oman dalam penambahan devisa negara.

Disamping sektor pariwisata, pemerintah Oman juga mengembangkan sektor industri. Tercatat beberapa kawasan industri didirikan. Misalnya, kawasan industri di daerah Rusayl dekat Muscat, daerah Sohar di wilayah utara dan Rasyut di wilayah selatan. Serta pada akhir tahun 1993 kawasan industri Nizwa di wilayah pedalaman dibuka.<sup>60</sup>

Pemerintah Oman berharap pertumbuhan industri dapat meningkat agar bisa mengurangi pengeluaran pemerintah, terutama sektor pembangunan dan pertahanan.

## **2.4 Pendidikan**

Pada saat Sultan Qaboos berkuasa, pendidikan menjadi prioritas yang utama dalam pembangunan di Oman.<sup>61</sup> Tercatat bahwa pemerintah Oman telah meningkatkan Jumlah sekolah dari 3 Sekolah Dasar pada tahun 1970 menjadi 367 Sekolah Dasar (enam Tahun), 311 Sekolah Menengah (enam Tahun), 23 Sekolah Kejuruan dan Keguruan, dan satu Perguruan Tinggi (Sultan Qaboos University, sejak tahun 1986) di bidang teknik, sains, pertanian dan pendidikan islam.<sup>62</sup>

Tujuan ditingkatkannya mutu pendidikan di Oman tidak lain adalah untuk memberantas buta huruf di Oman sekaligus

---

<sup>60</sup> Ibid, hal.170

<sup>61</sup> The Maryland Center for study of History, dalam [www.geocities.com/collegepark/](http://www.geocities.com/collegepark/), diakses 9 Agustus 2001

<sup>62</sup> Ensiklopedi Islam, op.cit., hal.52

untuk menghasilkan orang-orang yang terlatih dan berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan negara.<sup>63</sup>

Pada tahun-tahun pertama mengembangkan pendidikan, Oman dihadapkan pada kenyataan bahwa tak ada tenaga guru yang benar-benar berkualitas guru. Karena itu pemerintah mendatangkan guru dari negara-negara yang menggunakan bahasa Arab, seperti Mesir, Sudan, dan Yordania. Minat belajar pun berkembang. Tidak jarang ayah dan anak duduk dalam kelas yang sama.<sup>64</sup>

## 2.5 Sejarah Oman

Penelitian Arkeologis membuktikan bahwa manusia pertama mendiami Oman 10.000 tahun yang lalu. Dan sejak tahun 3000 SM wilayah itu makmur berkat armada dagangannya. Mata dagang utama ialah sejenis damar yang harum baunya.<sup>65</sup>

Pada masa lalu orang Arab dari berbagai suku memasuki Oman sejak abad pertama masehi; gelombang pertama datang dari barat Arab di bawah pimpimam Bani Hina, sedang gelombang kedua datang dari utara di bawah Ba'awal. Kemudian Kerajaan Sasanid Persia di bawah Pemerintahan Ardashir I (226-241) memasukkan Oman dalam wilayah kekuasaannya dan menjadikannya sebagai pelabuhan utama dan pusat perdagangan. Kapal-kapal Oman melintasi pulau-pulau sepanjang Teluk Persia dan Samudra Hindia. Pada abad ke-6, Sasanid Shah Kawadh (488-531) mencoba mengawasi orang Arab yang melanggar tanah Persia, tetapi tidak berhasil. Akibatnya terjadi peperangan antara orang Arab dan Persia. Orang Persia kalah dan setuju menarik

---

<sup>63</sup>The Maryland Center for Study of History, dalam [www.geocities.com/collegepark/](http://www.geocities.com/collegepark/), diakses 9 Agustus 2001

<sup>64</sup> Kompas, 4 Februari 1995, op.cit.

<sup>65</sup> Ensiklopedia Nasional Indonesia, op.cit., hal. 272

diri dari Oman, kecuali 4.000 penghuni tetap. Pada masa pemerintahan Anushirwan (531-579), diberikan pengakuan kemerdekaan kepada orang arab\*di bawah pimpinan Syeikh Bani Maa'al sebagai *Julanda* (pemimpin yang bertugas sebagai gubernur propinsi Kerajaan Sasanid di Rustaq, Oman). Orang Persia tetap menguasai daerah pedalaman Oman.<sup>66</sup>

Kemudian Oman mengalami perubahan besar sejak orang Arab menganut agama Islam. Tahun 630, utusan Nabi Muhammad SAW, Amr bin As, datang ke Oman untuk berdakwah. Ia bertemu dengan *Julanda* Abd dan Jaifar, mengajak mereka menerima agama baru Islam. Ajakan ini diterima dengan persetujuan umum dari para Syeikh (Kepala Suku) Arab. Mereka mengutus delegasi ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislaman mereka. Amr bin As yang menetap disana mendorong orang Arab muslim agar mengajak orang persia di Oman menerima Islam. Ajakan ini ditolak dan pertempuran pun terjadi. Orang Arab muslim menang dan mengusir orang Persia. Sejak itu Oman menjadi Arab muslim.<sup>67</sup>

Kebijakan Nabi Muhammad SAW menerapkan pemerintahan Islam di Oman sangat cemerlang. Zakat yang dihimpun di Oman semuanya didistribusikan kepada golongan miskin, tanpa ada yang dikirim ke Madinah. Tetapi ketika kebijaksanaan ini diubah oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mereka memberontak. Sejak itu Hudaifah bin Muhsin, salah seorang yang berhasil menumpas pemberontakan itu, menjadi Gubernur Oman. Pada pemerintahan *al khulafa' ar-rasyidun* berikutnya, Oman tenang dan damai di bawah kontrol *Julanda*, di bawah Gubernur Bahrein (Timur Arab).

---

<sup>66</sup> Ensiklopedia Islam, op.cit., hal 53

<sup>67</sup> ibid, hal. 54

Orang Arab Muslim Oman memainkan peranan penting dalam menaklukkan Persia dan bagian barat India. Tokohnya yang terkenal antara lain Muhallab bin Abu Sufrah.<sup>68</sup>

Tahun 684, Oman dikuasai oleh Aliran Khawarij. Sejak itu selama pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, kedua Dinasti itu tidak pernah dapat menguasai Oman secara penuh. Namun sampai tahun 850 Oman merupakan bagian dari darul Islam yang terdapat di semenanjung Arabia sejak abad ke-7. Julanda Ibnu Mas'ud menyatakan diri sebagai Imam Khawarij di Oman. Tahun 794 golongan al-Ibadyyah, cabang moderat Khawarij yang berposisi memilih Muhammad bin Abdullah bin Abi Affan sebagai Imam. Sejak golongan al-Ibadyyah membentuk Imamah di Oman, wakil dari berbagai suku secara bergantian menjadi Imam.<sup>69</sup>

Di bawah Dinasti Ya'riba (1624-1749) dan abad pertama dari Dinasti Al-Bu Sa'id (memerintah sejak 1741 sampai sekarang), Oman secara bergantian dikuasai oleh bangsa-bangsa penjajah Portugis, Belanda, Perancis dan Inggris. Disamping itu, konflik dan peperangan antara etnik selalu mewarnai kehidupan sosial dan politik di Oman. Konflik berakhir setelah mereka sepakat memilih Ahmad bin Sa'id Al-Bu Sa'id menjadi Imam (1740-an ). Keturunannya yang dikenal dengan keluarga Al-Bu Sa'id yang bemarkas di Muskat segera menjadi penguasa Oman, yang kemudian dikenal dengan negara "Muskat dan Oman".<sup>70</sup>

Dinasti Oman telah berkuasa sejak tahun 1749. Wilayah ini dapat dikatakan sebagai negara otonom tertua di Arab. Pernah

---

<sup>68</sup> ibid

<sup>69</sup> Ibid

<sup>70</sup> "Oman", dalam *Negara dan Bangsa*, Grolier Inc., Connecticut, 1987, hal.384

memperkuat posisinya di Oman pada tahun 1908 melalui perjanjian persahabatan. Hubungan khusus kedua bangsa, Inggris dan Oman, berlangsung terus. Pada tanggal 20 Desember 1951, Oman diakui oleh Inggris sebagai negara merdeka secara penuh. Setelah kedua negara itu menandatangani perjanjian persahabatan yang baru.<sup>71</sup>

## 2.5 Politik Dalam Negeri Oman

Mencermati masalah dalam negeri Oman, satu hal yang mencolok adalah begitu besarnya peranan Sultan Qaboos dalam proses pembuatan keputusan politik di Oman. Bahkan terkadang cenderung otoriter. Hal ini wajar saja karena Oman merupakan sebuah negara Monarki Absolut. Walaupun terkesan otoriter, rakyat Oman tetap menginginkan kesultanan ini tetap berjalan dan Sultan Qaboos tidak tergantikan oleh orang lain sampai saat ini.

Keotoriteran Sultan Qaboos diimbangi dengan kesediaannya untuk berkeliling di sejumlah daerah guna mendengar apa kemauan rakyatnya. Paling tidak dalam setahun, Sultan Qaboos melakukan kegiatan ini dengan mengendarai mobil. Hasil "turba" ini akan disampaikan pada tanggal 18 November yang merupakan hari nasional negara Oman. Pada hari itu, Sultan Qaboos menyampaikan pidato umum untuk mengevaluasi kebijakan lalu dan menerangkan suatu kebijakan yang akan datang.<sup>72</sup>

Dalam sistem pemerintahan Oman, perangkat kekuasaan Oman meliputi *Diwan of the Royal Court, the Ministry of Palace Office Affairs, the Cabinet of Ministers and Secretariat of the Cabinet,*

---

<sup>71</sup> Peter A. Knecht, "Profile of Sultanate of Oman", U.S. Department of State Bureau of Public Affairs, <http://dosfan.lib.uic.edu/erc/bgnotes/nea/oman9412html>, diakses 13 Maret 2002

<sup>72</sup> Riza Sihbudi, et.al., op.cit., hal. 179

memperkuat posisinya di Oman pada tahun 1908 melalui perjanjian persahabatan. Hubungan khusus kedua bangsa, Inggris dan Oman, berlangsung terus. Pada tanggal 20 Desember 1951, Oman diakui oleh Inggris sebagai negara merdeka secara penuh. Setelah kedua negara itu menandatangani perjanjian persahabatan yang baru.<sup>71</sup>

## 2.5 Politik Dalam Negeri Oman

Mencermati masalah dalam negeri Oman, satu hal yang mencolok adalah begitu besarnya peranan Sultan Qaboos dalam proses pembuatan keputusan politik di Oman. Bahkan terkadang cenderung otoriter. Hal ini wajar saja karena Oman merupakan sebuah negara Monarki Absolut. Walaupun terkesan otoriter, rakyat Oman tetap menginginkan kesultanan ini tetap berjalan dan Sultan Qaboos tidak tergantikan oleh orang lain sampai saat ini.

Keotoriteran Sultan Qaboos diimbangi dengan kesediaannya untuk berkeliling di sejumlah daerah guna mendengar apa kemauan rakyatnya. Paling tidak dalam setahun, Sultan Qaboos melakukan kegiatan ini dengan mengendarai mobil. Hasil "turba" ini akan disampaikan pada tanggal 18 November yang merupakan hari nasional negara Oman. Pada hari itu, Sultan Qaboos menyampaikan pidato umum untuk mengevaluasi kebijakan lalu dan menerangkan suatu kebijakan yang akan datang.<sup>72</sup>

Dalam sistem pemerintahan Oman, perangkat kekuasaan Oman meliputi *Diwan of the Royal Court, the Ministry of Palace Office Affairs, the Cabinet of Ministers and Secretariat of the Cabinet,*

---

<sup>71</sup> Peter A. Knecht, "Profile of Sultanate of Oman", U.S. Department of State Bureau of Public Affairs, <http://dosfan.lib.uic.edu/erc/bgnotes/nea/oman9412html>, diakses 13 Maret 2002

<sup>72</sup> Riza Sihbudi, et.al., op.cit., hal. 179

*The Specialised Councils, Governorate of Muscat, dan Majlis Ash'shura.*<sup>73</sup>

**a. Diwan of the Royal Court**

Diwan of the Royal Court adalah kantor tempat Sultan bekerja. Dari tempat ini kehidupan Oman ditentukan oleh Sultan yang kekuasaannya sangat luas dan tidak terbatas.

**b. The Ministry of Palace Office Affairs**

Badan ini secara administratif menagtur segala kegiatan sultan Oman dan kepentingan istana Sultan.

**c. The Cabinet of Ministers and Secretariat of the Cabinet.**

Secara formal, kabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Titah Sultan menjadi kebijakan kabinet. Keputusan hukum dan dekrit adalah hak Sultan. Semua perjanjian Internasional dan persetujuan lainnya akan berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Sultan. Sekretariat Kabinet bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Salah satunya adalah berusaha menekankan bahwa keputusan kabinet dilaksanakan dalam kerangka waktu dan Budget yang telah ditentukan. Kabinet ini terdiri dari seorang Wakil Sultan, Deputi Perdana Menteri urusan masalah kabinet, Deputi Perdana Menteri urusan finansial dan ekonomi, beberapa Menteri yang mengurus departemen, dan beberapa Menteri Negara.

Untuk memudahkan pengaturan pemerintahan, daerah Oman dibagi menjadi 59 *wilayat* (propinsi) di bawah Pengawasan Menteri Dalam Negeri. Setiap *wilayat* dikepalai oleh seorang *Wali* (Gubernur) yang dipilih oleh Sultan. Ada satu wilayah yang lebih otonom dibandingkan dengan wilayah lain, yaitu Dhofar. Daerah Muscat diperlakukan sebagai daerah khusus.

---

<sup>73</sup> Ibid, hal. 173-175

*The Specialised Councils, Governorate of Muscat, dan Majlis Ash'shura.*<sup>73</sup>

**a. Diwan of the Royal Court**

Diwan of the Royal Court adalah kantor tempat Sultan bekerja. Dari tempat ini kehidupan Oman ditentukan oleh Sultan yang kekuasaannya sangat luas dan tidak terbatas.

**b. The Ministry of Palace Office Affairs**

Badan ini secara administratif menagtur segala kegiatan sultan Oman dan kepentingan istana Sultan.

**c. The Cabinet of Ministers and Secretariat of the Cabinet.**

Secara formal, kabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Titah Sultan menjadi kebijakan kabinet. Keputusan hukum dan dekrit adalah hak Sultan. Semua perjanjian Internasional dan persetujuan lainnya akan berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Sultan. Sekretariat Kabinet bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Salah satunya adalah berusaha menekankan bahwa keputusan kabinet dilaksanakan dalam kerangka waktu dan Budget yang telah ditentukan. Kabinet ini terdiri dari seorang Wakil Sultan, Deputi Perdana Menteri urusan masalah kabinet, Deputi Perdana Menteri urusan finansial dan ekonomi, beberapa Menteri yang mengurus departemen, dan beberapa Menteri Negara.

Untuk memudahkan pengaturan pemerintahan, daerah Oman dibagi menjadi 59 *wilayat* (propinsi) di bawah Pengawasan Menteri Dalam Negeri. Setiap *wilayat* dikepalai oleh seorang *Wali* (Gubernur) yang dipilih oleh Sultan. Ada satu wilayah yang lebih otonom dibandingkan dengan wilayah lain, yaitu Dhofar. Daerah Muscat diperlakukan sebagai daerah khusus.

---

<sup>73</sup> Ibid, hal. 173-175



#### **d. The Specialized Councils (Dewan Khusus)**

Dewan ini dibentuk berdasarkan dekrit Sultan dan langsung di bawah pengawasan Sultan. Dewan Khusus yang ada di Oman antara lain:

##### 1. The Financial Affairs Council

Dewan ini bertugas untuk mengatur kebijakan keuangan negara dan menyusun budget nasional.

##### 2. The Sultan Qaboos University Council

Dewan ini bertugas untuk menjaga standar universitas dan mendirikan college, bagian, maupun center yang baru.

##### 3. The Civil Service Council

Dewan ini bertugas untuk mengatur kebijakan umum tentang pelayanan bagi masyarakat.

#### **e. Governorate of Muscat**

Governorate of Muscat ini dibentuk untuk bertanggung jawab dalam mengatur ibukota. Alasan dibentuknya suatu institusi tersendiri untuk Muscat ini adalah mengingat daerah itu sebagai ibukota negara yang memerlukan suatu penanganan khusus.

#### **F. Majlis Ash'Shura**

Majlis yang jumlah anggotanya 35 orang serta dibentuk pada akhir 1990 ini menggantikan fungsi State Consultative Council. Jumlah 35 orang ini kemudian ditingkatkan menjadi lebih dari 59 orang. Dari 59 Wilayah, ada yang diwakili satu orang dan ada yang diwakili dua orang, tergantung jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut.

Perbedaan pokok kedua lembaga itu adalah cara menjadi anggotanya. Anggota State Consultative Council tidak dipilih oleh masyarakat. Anggota ini ditunjuk oleh Sultan. Sebaliknya,

seluruh anggota Majelis Ash'Shura dipilih dan tidak ada wakil pemerintah. Masing masing wilayah Oman yang berjumlah 59 mengirim satu atau dua orang terpilih untuk menjadi anggota Majelis. Masa kerja anggota Majelis adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali pada periode selanjutnya. Ketua Majelis dipilih oleh Sultan.

Salah satu tugas dari Majelis adalah membahas seluruh Rancangan Undang-Undang di bidang Sosial dan ekonomi yang telah dipersiapkan oleh menteri, sebelum disahkan menjadi Undang-undang. Majelis juga berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan, memeriksa pelaksanaannya dalam kerangka strategi negara, dan menyesuaikan kemampuan dana. Majelis juga ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Dewan menteri megatur dua pertemuan tahunan yang diikuti Ketua dan Biro Majelis untuk melakukan koordinasi antara pemerintah dan Majelis.

Mengingat di Oman tidak ada partai politik, pencalonan anggota Majelis didapatkan dari wilayah. Adapun tata cara pemilihan anggota Majelis dimulai dari wilayah. Tiap-tiap wilayah menominasikan beberapa penduduk untuk duduk sebagai calon anggota Majelis. Kemudian para calon digodok oleh suatu komisi yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dalam wilayah tersebut. Setelah itu, dua atau empat calon itu (tergantung jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah) dipilih untuk menjadi anggota majlis oleh Sultan. Sultan Qaboos akan memilih satu dari dua calon atau dua dari empat calon anggota untuk ditetapkan menjadi anggota Majelis. Suatu wilayah yang mempunyai penduduk lebih dari 30.000 jiwa akan mempunyai wakil di Majelis sebanyak dua orang.

Selain hal diatas, di Oman terdapat kelompok penting yang terlibat dalam percaturan politik, yaitu keluarga kerajaan, para pemimpin suku, penasehat Asing dan para pedagang. Dalam berbagai hal keluarga raja memegang peran yang sangat sentral. Para penasehat Sultan semuanya keluarga sendiri. Mereka juga memegang pos-pos kunci di departemen dan gubernuran.<sup>74</sup>

Pada masa Sultan Said bin Taimur, ayah Sultan Qaboos, pemimpin suku mempunyai peran yang cukup penting dalam proses kepolitikan Oman. Peranan pemimpin suku tersebut cukup signifikan dalam memimpin desa. Akan tetapi pada masa Sultan Qaboos, peranan pemimpin suku diturunkan. Kekuasaan mereka dikurangi dengan desentralisasi pemerintah melalui reformasi politik. Antara lain misalnya dengan membangun dewan pemerintah lokal.<sup>75</sup>

Sedangkan yang dimaksud para penasehat asing disini adalah orang Inggris yang diberi beberapa wewenang. Dalam sejarahnya, Oman tidak terlepas dari hubungannya dengan Inggris. Hubungan mereka begitu dekat, mengingat Oman pernah dijajah oleh Inggris. Pada masa lalu Inggris banyak memegang posisi kunci dalam roda pemerintahan Oman terutama dalam militer. Tercatat sampai tahun 1994, Inggris tetap melatih tentara.<sup>76</sup> Akan tetapi untuk mensukseskan program omanisasi, Sultan Qaboos mempunyai kebijakan untuk mengurangi tenaga asing dan mendorong orang Oman untuk menduduki kursi pemerintahan. Walaupun demikian, untuk beberapa waktu

---

<sup>74</sup> *ibid*, hal. 177

<sup>75</sup> *ibid*

<sup>76</sup> *ibid*

mendatang Oman masih membutuhkan tenaga asing untuk membantu pembangunan negara.

Kelompok lain yang turut serta memainkan peran dalam kehidupan politik Oman adalah para pedagang. Secara tradisional kaum pedagang tersebut memiliki jalur dengan Sultan dalam berhubungan dengan dunia luar. Pada keluarga pedagang lama banyak ditemukan nama yang berasal dari orang India dan Pakistan.<sup>77</sup> Ini membuktikan bahwa di masa lalu, Oman banyak berhubungan dagang dengan negara-negara disekitar India. Akan tetapi setelah Sultan Qaboos memerintah, orientasi perdagangan Oman berubah haluan ke Barat. Alasan Oman menjalin hubungan yang erat dengan Barat agar memperoleh barang dan jasa sebanyak mungkin dalam rangka pembangunan negaranya.<sup>78</sup>

Dalam administrasi pemerintahan Oman, untuk menangani tugas sehari-hari, Sultan dibantu tiga wakil perdana menteri, seorang wakil pribadi Sultan, seorang mensesneg serta kabinet 25 menteri. Seluruh menteri diangkat dan diberhentikan oleh Sultan tanpa batasan waktu. Tidak ada istilah perodesasi masa bakti di Oman. Selama Sultan masih memerlukan seseorang untuk duduk di jabatan menteri, selama itu pula ia menjadi menteri.

Sejak Sultan Qaboos bin Sa'id menggulingkan kepemimpinan ayahnya, Sultan Said bin Taimur, 18 November 1970, Oman tumbuh hampir tanpa gejolak politik. Rakyat Oman seolah cuma percaya pada Sultan Qaboos sebagai "Ratu Adil" yang akan membawa Oman memasuki era globalisasi. Kalau rakyat mempunyai keluhan, mereka dapat menyampaikannya langsung kepada Sultan Qaboos yang rutin mengunjungi rakyat di seluruh

---

<sup>77</sup> Ibid, hal 157

<sup>78</sup> "Demokrasi Bagi Oman" dalam *Kompas* 1 Agustus 1995

negeri. Suksesi sama sekali menjadi hal yang jauh dari pembicaraan sehari-hari. Tidak perlu ada imbauan atau ajakan berbau ideologis untuk membuat rakyat malas membicarakan ideologis.<sup>79</sup> Dalam hal ini yang menjadi pikiran rakyat Oman adalah bagaimana mengantar Oman menjadi satu negara yang besar seperti yang pernah dialami Oman pada masa lalu. Mereka percaya Sultan akan memberikan yang terbaik dalam memimpin negeri.

Dengan kondisi semacam ini, rakyat tidak begitu tertarik untuk terlalu menuntut apa di Barat yang dikenal dengan demokrasi. Cara Sultan mendekati rakyatnya ini ternyata disukai oleh masyarakat Oman. Sehingga mereka tetap menginginkan kesultanan ini tetap berjalan dan Sultan tidak digantikan oleh orang lain.

Seorang pengamat wanita dari Jerman yang telah bertahun-tahun hidup di Oman mengatakan, "Meski kesultanan ini berdasarkan sistem otokrasi, tapi dia mampu melayani seluruh rakyatnya dan terbukti cocok serta baik untuk rakyat. Untuk apalagi ide demokrasi yang berlaku di barat dipaksakan di Oman, padahal demokrasi Barat semacam itu belum tentu bisa berjalan baik di budaya masyarakat Oman".<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Kompas, 4 Februari 1995, op.cit.

<sup>80</sup> Kompas, 4 Februari 1995, op.cit.

### BAB III

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI OMAN PADA AWAL PEMERINTAHAN SULTAN QABOOS**

Tujuan politik luar negeri (PLN) tiap negara pada dasarnya sama, yaitu untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing. Kepentingan nasional utama dari masing-masing negara adalah menjaga keamanan dan eksistensinya, serta mempertahankan atau menaikkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan itu, banyak faktor yang mempengaruhi terutama faktor lingkungan, baik dalam negeri maupun internasional. Faktor tersebut dapat berupa faktor lingkungan fisik maupun nonfisik. Faktor-faktor inilah yang membatasi ruang gerak para negarawan atau politisi suatu negara. Selain faktor lingkungan, persepsi para negarawan atau politisi yang bersangkutan juga mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Jadi, pada dasarnya perumusan politik luar negeri merupakan kombinasi banyak faktor, yaitu fisik dan nonfisik, dalam dan luar negeri, dan persepsi pribadi para pembuat keputusan.<sup>81</sup>

Berdasarkan batasan diatas, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan politik luar negeri Oman pada awal pemerintahan Sultan Qaboos antara lain:

### **3.1 Ketidakmampuan Politik Isolasi Mengatasi Berbagai Permasalahan di Dalam dan Luar Negeri Oman pada Masa Pemerintahan Sultan Sa'id bin Taimur**

Dalam istilah politik, isolasi berarti penutupan rapat. Dalam sejarah kita mengenal praktek isolasi dari Jepang sebelum Meiji

---

<sup>81</sup> Akhmad Khusyairi, *op.cit.* hal. 43

Restorasi, yaitu penutupan pintu Jepang terhadap seluruh pengaruh dan bentuk-bentuk dari luar. Sedangkan Isolasionisme berarti kebijakan luar negeri dari suatu negara untuk menutup diri dan tidak mau terlibat dengan berbagai persoalan internasional.<sup>82</sup> Istilah isolasionisme biasanya juga digunakan dalam menggambarkan situasi yang menuntut suatu negara agar pemerintahan membatasi hubungan dengan negara lain khususnya hubungan politik hingga taraf paling minimum.<sup>83</sup>

Oman di bawah pemerintahan Sultan Said bin Taimur begitu tertutup dalam berhubungan dengan dunia luar. Praktis hanya Inggris dan India saja yang menjadi partner kerjasamanya. Disamping itu, Sultan Said enggan untuk berhutang kepada negara lain. Menurut dia hutang akan menyebabkan kemunduran bagi Oman karena selalu tergantung kepada negara lain.<sup>84</sup> Apa yang terjadi di Oman pada masa Sultan Said bin Taimur tersebut sama halnya dengan negara-negara yang menganut politik isolasi pada masa lalu.

Secara logika, pada saat itu orientasi yang dilakukan oleh Sultan Said bin Taimur didasarkan pada asumsi bahwa negara dalam hal ini Oman dapat mencapai keamanan dan stabilitas negaranya dengan mengurangi transaksi dengan unit politik (negara) lain.

Menurut **Holsti**, untuk dapat mempertahankan "cara hidup" (way of life), termasuk nilai sosial, struktur politik dan pola ekonomi, suatu unit politik tidak wajib mengubah lingkungan luarnya untuk kepentingannya.<sup>85</sup> Dalam banyak hal, Oman

---

<sup>82</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hal. 67

<sup>83</sup> Ibid

<sup>84</sup> Riza Sihbudi, et.al., *op.cit.*, hal.169

<sup>85</sup> K.J. Holsti, *op.cit.*, hal. 109

dibawah pemerintahan Sultan Said, sebagai unit politik, tidak pula bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya.

Selama kurang lebih tiga dasawarsa (1932-1970), pemerintahan Oman mengurangi secara sistematis hubungan dengan dunia luar dan menguasai dirinya dari penetrasi asing. Bantuan luar negeri (kecuali dari Inggris) ditolak; dan Sultan Said menolak untuk berhubungan dengan negara-negara Arab apalagi bergabung dengan organisasi internasional.

Hal diatas menunjukkan bahwa mungkin ada insentif yang kuat bagi pemerintahan Sultan Said bin Taimur untuk memilih strategi isolasi. Sultan Said yang menerapkan politik isolasi ini menilai kondisi internasional dan ancaman potensial secara realistis, tidak seperti kebanyakan negara yang berargumentasi bahwa dunia di sekeliling mereka sama. Oman yang jauh dari pergaulan internasional tersebut, mungkin percaya bahwa keterlibatan Oman dalam tata hubungan internasional hanya akan membahayakan nilai-nilai sosial, ekonomi dan politik mereka. Dengan politik isolasi yang diterapkan, Sultan Said mungkin yakin bahwa Oman pasti mampu dalam memelihara nilai-nilai mereka dan mencapai aspirasi mereka.

Akan tetapi yang kemudian terjadi adalah, politik isolasi yang diterapkan oleh Sultan Said bin Taimur tidak sesuai dengan fakta lapangan. Adanya isolasi justru menambah keterpurukan bagi Oman. Keengganan untuk berhubungan dengan negara lain, khususnya dalam masalah perdagangan, menyebabkan kucuran minyak yang dihasilkan sejak akhir 1960 tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Sultan Said. Ini jauh berbeda dengan negara-negara tetangganya, seperti Iran, Arab Saudi dan



dari salah satu prinsip luar negerinya, juga merupakan tindakan rasional Qaboos sebagai upaya menyesuaikan diri dengan situasi internasional yang berkembang saat itu. Oman dengan kekuatan militer relatif kecil merasa belum mampu menjaga keamanan wilayahnya untuk menghadapi ancaman dari salah satu blok yang ada, Uni Soviet. Uni Soviet merupakan ancaman langsung terhadap eksistensi Kesultanan Oman. Untuk itu Oman perlu mencari “partner” blok yang mampu untuk menjadi pelindungnya, yaitu Amerika Serikat.

Model Aktor Rasional sangat cocok dengan Kesultanan Oman yang merupakan negara Monarki Absolut. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Oman, Sultan Qaboos bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Disamping itu pula, Qaboos juga bertindak sebagai ketua Dewan Pembangunan Nasional dan Kabinet yang beranggotakan beberapa orang yang diangkat oleh Sultan. Titah Sultan menjadi kebijakan kabinet. Keputusan hukum dan dekrit adalah hak Sultan. Semua perjanjian Internasional dan persetujuan lainnya akan berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Sultan.<sup>28</sup>

Selain teori diatas, penulis juga mendasarkan pada konsep **Kepentingan Nasional** sebagai kerangka analisa politik luar negeri Oman. Jika dikaitkan dengan Model I Pengambilan Keputusan, kepentingan nasional merupakan salah satu hal yang tidak dipisahkan dengannya. Secara normatif politik luar negeri Oman memang dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kepentingan Kesultanan Oman. Walaupun dirasa sangat “terpaksa” untuk tidak berpihak pada salah satu blok yang

---

<sup>28</sup> Riza Sihbudi, et.al., op.cit., hal.174

dibawah pemerintahan Sultan Said, sebagai unit politik, tidak pula bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya.

Selama kurang lebih tiga dasawarsa (1932-1970), pemerintahan Oman mengurangi secara sistematis hubungan dengan dunia luar dan menguasai dirinya dari penetrasi asing. Bantuan luar negeri (kecuali dari Inggris) ditolak; dan Sultan Said menolak untuk berhubungan dengan negara-negara Arab apalagi bergabung dengan organisasi internasional.

Hal diatas menunjukkan bahwa ada insentif yang kuat bagi pemerintahan Sultan Said bin Taimur untuk memilih strategi isolasi. Sultan Said yang menerapkan politik isolasi ini menilai kondisi internasional dan ancaman potensial secara realistis, tidak seperti kebanyakan negara yang berargumentasi bahwa dunia di sekeliling mereka sama. Oman yang jauh dari pergaulan internasional tersebut, percaya bahwa keterlibatan Oman dalam tata hubungan internasional hanya akan membahayakan nilai-nilai sosial, ekonomi dan politik mereka. Dengan politik isolasi yang diterapkan, Sultan Said yakin bahwa Oman pasti mampu dalam memelihara nilai-nilai mereka dan mencapai aspirasi mereka.

Akan tetapi yang kemudian terjadi adalah, politik isolasi yang diterapkan oleh Sultan Said bin Taimur tidak sesuai dengan fakta lapangan. Adanya isolasi justru menambah keterpurukan bagi Oman. Keengganan untuk berhubungan dengan negara lain, khususnya dalam masalah perdagangan, menyebabkan kucuran minyak yang dihasilkan sejak akhir 1960 tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Sultan Said. Ini jauh berbeda dengan negara-negara tetangganya, seperti Iran, Arab Saudi dan

negara-negara penghasil minyak di kawasan teluk Persia. Situasi semacam ini justru semakin memperdalam kesengsaraan rakyat Oman. Dengan demikian bisa dibuktikan bahwa politik isolasionisme sesungguhnya tidak memberikan sumbangan terhadap upaya-upaya untuk kemajuan bangsa Oman, terutama terhadap langkah pemberdayaan rakyat Oman.

Apabila dikaitkan dengan Teori Pengucilan, isolasi berarti menutup sumber-sumber kekuatan ekonomi elit yang menguasai negara.<sup>86</sup> Kemerostan aktivitas ekonomi, yang dimonopoli oleh Sultan Said bin Taimur sebagai elit penguasa, dengan sendirinya akan mengancam stabilitas dan kesinambungan regimnya. Dalam hal ini elit penguasa akan terpojok dan lalu menyerah untuk menyesuaikan diri dengan kaidah kehidupan yang terjadi.

Dengan kondisi yang begitu memprihatinkan, Sultan Qaboos, putra dari Sultan Said bin Taimur, mengadakan kudeta tak berdarah untuk mengambil alih kekuasaan ayahnya pada tanggal 23 Juli 1970.<sup>87</sup> Apa yang dilakukan oleh Qaboos menganut pandangan diatas. Maksud Qaboos untuk mengambil alih kekuasaan ayahnya sendiri adalah untuk menyelamatkan bangsa Oman dari ambang kehancuran.

Dengan begitu semakin jelas bahwa politik isolatif tidak cocok untuk diterapkan di Oman. Ketertutupan hubungan dengan negara lain akan menjadikan Oman tertinggal dengan bangsa lain khususnya dengan negara-negara Arab.

### **3.2. Pengaruh Sistem Diffuse-Bloc**

Sistem Diffuse-Bloc menurut **K.J. Holsti** adalah suatu keadaan struktur sistem internasional yang terbagi menjadi dua

---

<sup>86</sup> P.LE. Priatna, "Demokratisasi, Sanksi dan Diplomasi" dalam *Kompas*, 26 Agustus 1996

<sup>87</sup> Riza Sihbudi, *op.cit.*, hal. 169

kekuatan, Blok Barat dan Blok Timur, yang oleh karena dengan berhasilnya negara-negara Non-Blok mematahkan supremasi militer dan diplomasi kedua blok tersebut sehingga kekuatan menjadi agak tersebar. Akan tetapi pada sistem ini anggota blok masih tergantung pada pemimpin blok dan relatif sedikit mengadakan hubungan dengan anggota blok lain yang menentang bloknnya.<sup>88</sup>

Keadaan Sistem Diffuse-Bloc bisa diterangkan demikian. Terciptanya struktur Bipolar pasca 1945 tercipta oleh ketidakamanan atau insecurity yang dirasakan oleh kedua aliansi yang ada, NATO dan Pakta Warsawa. Selama Amerika Serikat dianggap sebagai sumber ketidakamanan dunia oleh dan bagi Uni Soviet atau sekutu-sekutunya dan demikian pula sebaliknya, maka kedua adi daya tersebut tidak akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan keutuhan aliansi masing-masing<sup>89</sup>

Namun kemudian di awal tahun 1960-an gerakan negara-negara Non-Blok (Non-Aligned) muncul, yang mana prinsipnya adalah menentang pembagian dunia ke dalam blok-blok yang ada dan tidak ingin terbawa arus pertentangan antara kedua blok tersebut.

Menurut **Abdullah Kamil** gerakan negara-negara Non-Blok sesungguhnya berasal dari keinginan negara-negara muda yang baru merdeka yang ingin mengonsolidasikan kemerdekaan mereka dengan melakukan pembangunan ekonomi dan sosial. Tetapi karena mereka terhalang oleh realitas internasional, yang mana dunia terbagi dalam dua kelompok yang saling bertentangan dan saling ingin menghancurkan lawannya, maka mereka berupaya

---

<sup>88</sup> K.J. Holsti, op.cit., hal. 127

<sup>89</sup> Daed Joesoef, "Konsep Perdamaian dalam Sistem dan Strategi Nasional," dalam Analisis CSIS, 1 (Januari-Februari, 1989) hal. 12-14

menghindarkan diri dari pengelompokan ke dalam blok-blok tersebut dan berusaha membantu terciptanya suatu suasana damai.<sup>90</sup>

Perang dingin dan ketegangan-ketegangan internasional yang timbul dari pertentangan kedua adidaya itu dihadapi oleh negara-negara Non-Blok dengan tuntutan agar mereka dapat turut bicara dan berperan secara bebas aktif dalam forum-forum internasional untuk menyelesaikan pertentangan dan ikut menyusun tata hubungan internasional yang baru. Peranan gerakan Non-Blok di forum internasional antara lain:

*a. Dekolonisasi*

Perjuangan untuk menghapuskan penjajahan yang sudah dirintis sejak konferensi Bandung bisa dikatakan sebagai program utama Gerakan Non-Blok yang paling sukses. Usaha-Usaha mereka tercermin dalam resolusi PBB tahun 1960 yang berisikan Deklarasi Dekolonisasi yang mengatur kemerdekaan bagi bangsa dan rakyat yang masih dijajah, sampai pada usaha untuk membentuk suatu mekanisme yaitu komite Dekolonisasi. Berkat Perjuangan Gerakan Non-Blok tersebut dalam tahun 1961 terdapat 49 negara dunia ketiga yang merdeka.

*b. Pelucutan Senjata*

Apabila dalam waktu-waktu sebelumnya dalam perundingan tentang pelucutan senjata negara-negara dunia ketiga tidak diikuti, setelah KTT I Non-Blok 1961 beberapa anggota Non-Blok telah diikuti misalnya dalam Komite Pelucutan Senjata 18 negara (Eighteen Nations Disarmament Committee, ENDC) tahun

---

<sup>90</sup> Dirangkum dari ceramah Abdullah Kamil pada peresmian Pusat Studi Asia Afrika dan Negara-Negara Berkembang di Bandung 27 April 1983 yang berjudul "Relevansi Gerakan Non-Aligned dalam Percaturan Politik Internasional Dewasa Ini", dalam Jurnal Luar Negeri, Nomor Perdana (1983), hal. 31-60

1961, Konperensi Komite Pelucutan Senjata, Konperensi Komite Pelucutan Senjata (Conferention Committee Disarmament, CCD) tahun 1969.

*c. Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Berkembang.*

Sejak KTT-nya yang pertama, Gerakan Non-Blok telah menyoroti masalah-masalah ekonomi. Deklarasi Beograd minta dirombaknya sistem ekonomi kolonial dan peningkatan pembangunan pertanian dan industri di negara-negara berkembang.<sup>91</sup>

Dari penjelasan diatas tampak bahwa situasi sistem internasional yang bersifat Diffuse-Bloc itu adalah sistem internasional yang ditandai dengan persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur, serta munculnya negara-negara Dunia Ketiga yang baru tergabung dalam jajaran negara-negara Non-Blok, yang menentang pembagian dunia ke dalam Blok-blok yang ada serta tidak ingin terbawa arus pertentangan antara kedua blok tersebut.

Akan tetapi meskipun konsep yang digambarkan mengenai Non-Blok demikian, namun hal itu belum menjamin sikap untuk tidak memihak negara-negara Non-Blok kepada salah satu blok yang ada. Keadaan diffuse-bloc pada sistem internasional juga berpengaruh terhadap keputusan Qaboos untuk terhadap politik luar negerinya, artinya dengan siapa Oman nantinya akan bekerjasama apabila hubungannya dengan salah satu blok yang ada memburuk.

Dalam situasi semacam itu, maka menjadi "pihak ketiga" (non- blok) dirasa lebih bermakna bagi Oman dan lebih mungkin untuk mempengaruhi perilaku salah satu blok yang berhadapan

---

<sup>91</sup> Ibid, hal. 60

tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional Oman.

Pengungkapan mengenai Sistem Diffuse Bloc diatas adalah untuk melihat keadaan sistem internasional pada awal pemerintahan Sultan Qaboos. Keadaan sistem internasional yang demikian itu bisa digunakan untuk menjelaskan tindakan-tindakan Sultan Qaboos, terutama sebagai aspek yang melatarbelakangi diambilnya keputusan-keputusan politik luar negeri oleh Sultan Qaboos.

### **3.3 Kepribadian dan Persepsi Sultan Qaboos Mengembalikan Kejayaan Oman**

Sehubungan dengan fenomena yang berpengaruh terhadap politik luar negeri suatu negara, **T.B. Millar** berpendapat bahwa tidak ada faktor-faktor yang absolut dalam politik luar negeri. Mungkin saja suatu negara menentukan politik luar negeri berdasarkan prinsip-prinsip geografi, demografi, militer, ekonomi dan sebagainya. Tapi dari kesekian faktor tersebut kuncinya adalah tetap pada mereka yang membuat keputusan. Hal itu berarti melihat pemikiran-pemikirannya, image-nya dan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuhnya.<sup>92</sup>

Untuk menjelaskan lebih mendalam tentang peranan individu pembuat keputusan tersebut, maka digunakan pemikiran **Lloyd Jensen** mengenai kepribadian dan persepsi individu pembuat keputusan.

Menurut Jensen, *kepribadian* mengacu pada aspek lingkungan yang bisa berpengaruh terhadap perilaku politik luar negeri. Dalam hal ini kondisi lingkungan adalah kondisi stress

---

<sup>92</sup> T.B. Millar, "On Writing About Foreign Policy", dalam James A. Rosenau (Ed.), *International Politics and Foreign Policy*, The Free Press, New York, 1969, hal.59

manusia. Apabila menghadapi kondisi stress maka manusia yang bersemangat (Energetic People) akan lebih giat dan bisa menjadikan kondisi tersebut sebagai rangsangan untuk mengambil keputusan-keputusan yang kreatif, sedangkan manusia yang penakut (Anxious People) apabila menghadapi kondisi stress maka ia akan semakin tidak yakin dengan segala keputusan yang diambilnya.<sup>93</sup> Jadi disini merupakan satu kesatuan dari aspek-aspek yang ada pada diri individu baik biologis maupun psikologis yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan berkecenderungan bertingkah laku tertentu serta menunjukkan pola yang khas dan berbeda dengan individu lainnya.

Sebagai indikator untuk mengetahui kepribadian Sultan Qaboos adalah bagaimana tindakannya yang dituangkan dalam keputusan-keputusan di awal pemerintahannya, dan saat menghadapi kondisi stress, yaitu kondisi di bawah tekanan saat terjadinya krisis yang mengancam kehidupan Oman pada masa pemerintahan ayahnya, Sultan Said bin Taimur.

Pada saat Qaboos menjadi Sultan, ia langsung mengambil langkah-langkah yang tegas. Yang pertama kali dilakukannya adalah mencairkan kembali hubungan antara rakyat dan penguasa, serta hubungan Oman dengan negara lainnya yang sebelumnya terasa beku. Ini terbukti dengan adanya usaha Sultan Qaboos untuk menghapus segala macam pembatasan hubungan terhadap rakyat dan negara lainnya.<sup>94</sup> Kepribadian yang kuat dan mandiri tersebut amat terlihat pada awal pemerintahannya. Sedangkan sifatnya yang selalu menginginkan keadaan politik

---

<sup>93</sup> Lloyd Jensen, *Explaining Foreign Policy*, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1982, hal. 9-11

<sup>94</sup> Riza Sihbudi, *op.cit.*, hal. 169



yang seimbang terlihat melalui keputusan politik dalam negeri maupun luar negeri yang diambilnya.

Apa yang diutarakan oleh Jensen tentang kepribadian individu di bawah kondisi *stress* bisa saja mengalami perubahan drastis apabila menghadapi kejadian besar yang tidak dikehendakinya, ternyata sesuai dengan kasus perubahan politik luar negeri Oman ini. Di satu sisi Qaboos harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan besar negaranya, di sisi yang lain dia harus melawan ayahnya sendiri sebagai penguasa Oman saat itu. Dengan kondisi yang tertekan tersebut, Qaboos lebih mementingkan kepentingan nasional yang jauh lebih besar dibandingkan kepentingan ayahnya sendiri.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa kepribadian yang mandiri dan sebagainya, atau dalam bahasanya Jenssen, ia tergolong manusia yang bersemangat, *Energetic people*, yang selalu menginginkan keadaan politik yang seimbang, yang pada akhirnya menjadi peran yang paling menentukan dalam mengambil suatu perubahan politik luar negeri Oman dari yang isolatif menjadi lebih terbuka.

Satu hal yang patut dicatat disini adalah; meskipun dalam penelitian ini perubahan tentang kepribadian Qaboos hanya difokuskan dalam konteks kondisi *stress*, bukan berarti lantas mengabaikan kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengaruh orang tua, pendidikan, pengalaman masa kecil, maupun lingkungan pergaulannya. Melainkan untuk menganalisa permasalahan yang "khusus" tentang perubahan politik luar negeri ini, faktor-faktor penentu kepribadian yang lain dirasa kurang menonjol, sehingga tidak diperhatikan.

Sedangkan tentang *persepsi*, Jensen menyatakan bahwa meskipun seorang bisa menyebutkan sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap politik luar negeri suatu negara, pilihan akan tetap berada pada persepsi individu pembuat keputusan. Setiap kejadian internasional dipahami oleh individu pembuat keputusan berdasarkan image-nya tentang dunia. Sedang image terbentuk selama bertahun-tahun dan bukan hanya berdasarkan pengalaman individu pembuat keputusan saja. Melainkan juga mitos-mitos dari luar, serta tradisi yang ada dalam masyarakat.<sup>95</sup>

Sultan Qaboos dilahirkan di Salalah, Dhofar pada tanggal 18 November 1940.<sup>96</sup> Dia merupakan putra tunggal dari Sultan Said bin Taimur. Sultan Qaboos menghabiskan kehidupan dan pendidikannya selama 16 tahun di Salalah. Kemudian orang tuanya, Sultan Said bin Taimur, mengirimkannya ke sebuah sekolah swasta di Inggris. Menginjak usia dua puluh, Sultan Qaboos memasuki Akademi Militer Sandhurst sebagai calon perwira. Setelah lulus dari Sandhurst, dia bergabung Batalion infanteri kerajaan Inggris dalam sebuah tugas operasional di Jerman selama satu tahun.<sup>97</sup>

Setelah pengabdianya kepada militer Inggris berakhir, Sultan Qaboos melanjutkan studinya di Inggris dan mengambil studi tentang pemerintahan daerah. Setelah itu, ia keliling dunia dan pada akhirnya kembali ke Oman pada tahun 1964. Selama enam tahun, Sultan Qaboos mempelajari Islam dan sejarah tentang negara dan rakyatnya di Salalah. Dalam masa itu Sultan Qaboos menjadi sadar akan kemiskinan rakyatnya yang hidup

---

<sup>95</sup> Lloyd Jensen, *op.cit.*, hal.13

<sup>96</sup> Kompas, 1 Agustus 1995, *op.cit.*

<sup>97</sup> "Oman Foreign Affairs" dalam <http://www.omanet.com/tribute.html>, diakses 12 September 2001

dibawah standar. Sampai pada akhirnya ia berani mengukudeta tidak berdarah ayahnya sendiri pada tanggal 23 Juli 1970 untuk mengambil alih kekuasaan ayahnya, Sultan Said bin Taimur.<sup>98</sup>

Perubahan politik luar negeri yang cenderung menghendaki untuk membuka hubungan diplomatik dan bekerjasama dengan negara-negara lain, merupakan suatu keputusan politik luar negeri Qaboos berdasarkan image-nya tentang dunia internasional. Image tersebut jika tidak direspon dengan baik, akan menyebabkan ketertinggalan Oman dengan negara yang lain, khususnya dengan negara-negara Arab. Sehingga dalam hal ini suatu perubahan politik luar negeri menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi Oman. Ini dimaksudkan agar untuk masa mendatang Oman dapat bersaing dalam tata hubungan internasional.

Persepsi Qaboos yang demikian itu bukan hanya didasarkan pada pendidikannya dan pengalamannya yang bertahun-tahun di luar negeri tentang bagaimana melihat dampak dari adanya hubungan hubungan antar negara, melainkan juga atas mitos-mitos dari luar dan tradisi yang ada dalam masyarakat internasional bahwa politik isolasi yang pernah diterapkan oleh beberapa negara termasuk Oman di masa lalu, hanya menyebabkan keterpurukan bagi ekonomi dan politik negara.

Di samping itu, faktor sejarah yang menyatakan bahwa Oman pernah berjaya di masa lalu dalam berhubungan dengan negara lain semakin menambah keyakinan Qaboos dalam merubah politik luar negeri Oman pada awal pemerintahannya. Tercatat pada masa lalu Oman pernah menjadi negara maritim yang dikenal di banyak pelabuhan Persia, India, dan Asia

---

<sup>98</sup> [www.omanet.com](http://www.omanet.com), op.cit.

dibawah standar. Sampai pada akhirnya ia berani mengukudeta tidak berdarah ayahnya sendiri pada tanggal 23 Juli 1970 untuk mengambil alih kekuasaan ayahnya, Sultan Said bin Taimur.<sup>98</sup>

Perubahan politik luar negeri yang cenderung menghendaki untuk membuka hubungan diplomatik dan bekerjasama dengan negara-negara lain, merupakan suatu keputusan politik luar negeri Qaboos berdasarkan image-nya tentang dunia internasional. Image tersebut jika tidak direspon dengan baik, akan menyebabkan ketertinggalan Oman dengan negara yang lain, khususnya dengan negara-negara Arab. Sehingga dalam hal ini suatu perubahan politik luar negeri menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi Oman. Ini dimaksudkan agar untuk masa mendatang Oman dapat bersaing dalam tata hubungan internasional.

Persepsi Qaboos yang demikian itu bukan hanya didasarkan pada pendidikannya dan pengalamannya yang bertahun-tahun di luar negeri tentang bagaimana melihat dampak dari adanya hubungan hubungan antar negara, melainkan juga atas mitos-mitos dari luar dan tradisi yang ada dalam masyarakat internasional bahwa politik isolasi yang pernah diterapkan oleh beberapa negara termasuk Oman di masa lalu, hanya menyebabkan keterpurukan bagi ekonomi dan politik negara.

Di samping itu, faktor sejarah yang menyatakan bahwa Oman pernah berjaya di masa lalu dalam berhubungan dengan negara lain semakin menambah keyakinan Qaboos dalam merubah politik luar negeri Oman pada awal pemerintahannya. Tercatat pada masa lalu Oman pernah menjadi negara maritim yang dikenal di banyak pelabuhan Persia, India, dan Asia

---

<sup>98</sup> [www.omanet.com](http://www.omanet.com), op.cit.

Tenggara, sampai ke Guangzhou di Cina. Masa keemasan itu bermula saat Sultan bin Said Al Yarubi bukan hanya mengusir penjajah Portugis pada 1650, tapi juga meluaskan pengaruh ke Afrika Timur, sesudah menjadikan Persia dan Baluchistan sebagai propinsi Oman. Ketika kepemimpinan diteruskan Sultan Sayyid Said, Oman bahkan menjadi negeri pertama dari kawasan Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat pada 1840, setelah sebelumnya menembus Inggris, Perancis, Belanda dan banyak negara sekitarnya. Muscat, Ibukota Oman, menjadi pusat perdagangan dan pintu gerbang komoditi di kawasan Teluk.<sup>99</sup>

Ketiga faktor yang telah dikemukakan di atas merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya prinsip-prinsip politik luar negeri Oman yang *bersahabat dan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain; menghormati hukum internasional; mempererat hubungan dengan negara-negara Arab; dan tidak memihak kepada suatu blok kekuatan.*

---

<sup>99</sup> Kompas, 1 Agustus 1995, op.cit.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Kondisi Oman yang memprihatinkan sebagai hasil dari penerapan politik isolasi oleh pemerintahan Sultan Said bin Taimur, menjadikan anaknya, Qaboos bin Said Al-Bu Said, meng kudeta tak berdarah ayahnya untuk mengambil alih kekuasaan sekaligus berinisiatif untuk merubah politik luar negerinya.

Dilihat dari konteks permasalahan yang ada pada tahun 1970, baik di dalam negeri Oman maupun sistem internasional, terdapat beberapa faktor yang amat mempengaruhi perubahan politik luar negeri Oman pada awal pemerintahan Sultan Qaboos. Yang pertama adalah ketidakmampuan politik isolasi dalam menyelesaikan permasalahan di dalam dan luar negeri Oman pada masa pemerintahan Sultan Said bin Taimur. Yang kedua adalah pengaruh sistem diffuse-bloc. Yang ketiga adalah persepsi dan kepribadian Sultan Qaboos untuk membangkitkan kembali kejayaan Oman di masa lampau.

Dari faktor-faktor itulah kemudian Oman mengembangkan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bersahabat dan non intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain; menghormati hukum internasional; mempererat hubungan dengan negara-negara Arab dan tidak memihak pada salah satu blok kekuatan. Hasilnya, selama enam belas tahun kepemimpinan Sultan Qaboos, Oman menjadi negara yang kerap menjalin hubungan dengan negara lain tidak terkecuali menjadi anggota dalam organisasi regional maupun internasional.

Walaupun menekankan pada *open political system*, sejak diperintah oleh Sultan Qaboos, politik luar negeri Oman lebih

dikenal dengan politik ketergantungan. Pada masa pemerintahan Sultan Said bin Taimur, Oman tergantung pada Inggris. Sejak Sultan Qaboos berkuasa, Oman amat tergantung pada Amerika Serikat.

Ketergantungan Oman terhadap Amerika Serikat dikarenakan interpretasi dan persepsi Oman yang berbeda dengan negara-negara Arab mengenai tantangan yang dihadapi oleh Oman. Ancaman Komunisme terhadap keamanan Oman pada tahun 1970-an serta situasi dan kondisi kawasan Timur Tengah yang makin tidak menentu akibat sejumlah masalah yang berkembang, seperti invasi Soviet ke Afghanistan, revolusi Iran, dan perang Iran-Irak, menjadikan Oman harus menghadapi hal-hal tersebut dengan melakukan kerjasama yang erat dengan Amerika Serikat.

Sultan Qaboos menjalankan politik luar negeri yang tergantung kepada Amerika Serikat agar Oman dapat berperan aktif di dunia internasional khususnya dalam proses perdamaian Timur Tengah. Usahnya ini akan berhasil apabila secara eksternal mendapat dukungan dari aktor internasional, Amerika Serikat. Paling tidak Amerika Serikat juga mendukung kebijakan luar negeri Sultan Qaboos.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Allen, Calvin H, Jr. 1987. *Oman: the Modernization of the Sultanate*. Colorado: Westview Press
- Bandoro, Bantarto (ed.). 1991. *Timur Tengah Pasca Perang Teluk; Dimensi Internal dan Eksternal*. Jakarta: CSIS
- Dipoyudo, Kirdi. 1977. *Timur Tengah dalam Pergolakan*. Jakarta: CSIS.
- . 1981, *Timur Tengah Pasaran Strategis Dunia*. Jakarta: CSIS.
- Gie, The Liang. 1984. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian Kedudukan , Lingkup, dan Metodologi*. Yogyakarta : University Gadjah Mada Press
- Hadi, Sutrisno.2000. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Holsti, K.J. 1987. *Politik Internasional: Kerangka Analisa*, terjemahan Effin Sudrajat Dkk. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Kechichian, Joseph A. 1995. *Oman and the World: the Emergence of an Independent Foreign Policy*, California: Rand
- McClelland, Charles A. 1983. *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Sistem* , terjemahan Mien Joebhaar dan Ishaak Zahir . Jakarta: CV. Rajawali Press
- Mas'oeed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3S
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit Alumni



- Northedge, F.S. 1981. *The International Political System*. Boston: Faber and Faber
- Nisbet, Robert A. 1979. *The Social Bond on Introduction to the Study of Society*. New York: Koff
- Plano, Jack C. Roberts Eriggs. Helenan S. Robin. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: CV. Rajawali
- Riff, Michael A. 1995. *Kamus Ideologi Politik Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rosenau, James A. 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Frances Pinter Ltd
- (Ed.). 1969. *International Politics and Foreign Policy*. New York: The Free Press,
- Seabury, Paul. 1963. *Power, Freedom, and Diplomacy: The Foreign Policy of the United States of America*. New York: Random House
- Sihbudi, Riza. Zainuddin Djafar, Rahman Zainudin, M.H. Basyar, Amris Hassan, Dhurorudin Mashad. 1994. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta : Pustaka Jaya
- Sudarsono, Juwono. 1996. *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Surachmad, Winarno. 1975. *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: CV. Tarsito
- Wright, Quincy. 1987. *A study of International Relation dalam Teori Hubungan Internasional*. Yogyakarta: FISIP UGM

### **Disertasi dan Skripsi**

- Indriati, Sulvi. 1999. *Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Irak Pasca Perang Teluk II (1991)*. Skripsi S1 tidak diterbitkan . Jember : FISIP, UNEJ.

Khusyairi, Akhmad. 1995. *Politik Luar Negeri Australia di Bawah Pemerintahan Gough Whitlam (1972-1975) dan Hubungannya dengan Indonesia*. Desertasi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Murniman, Alib. 2001. *Peran Liga Arab dalam Proses Perdamaian Timur Tengah*. Skripsi S1 tidak diterbitkan Jember : FISIP, UNEJ.

### **Ensiklopedia dan Jurnal**

Analisis CSIS 1

Ensiklopedia Islam 4, 1993

Encyclopedia of Knowledge, 1991

Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1990

Foreign Affairs Vol.76, No.3 Mei-Juni 1997

Jurnal Ilmu Politik 9, 1991

Jurnal Luar Negeri Nomor Perdana, 1983

### **Surat Kabar**

Kompas, 4 Februari 1995

Kompas, 1 Agustus 1995

Kompas, 26 Agustus 1996

### **Internet**

[www.etectonics.com](http://www.etectonics.com)

[www.geocities.com](http://www.geocities.com)

[www.mideastweb.org](http://www.mideastweb.org)

[www.omanet.com](http://www.omanet.com)

[www.rand.org](http://www.rand.org)

[dosfan.lib.uic.edu](http://dosfan.lib.uic.edu)

**LAMPIRAN**

Lampiran I : Peta Geografi Oman

Lampiran II : Peta Instalasi Militer Oman

Lampiran III: Foto Sultan Qaboos

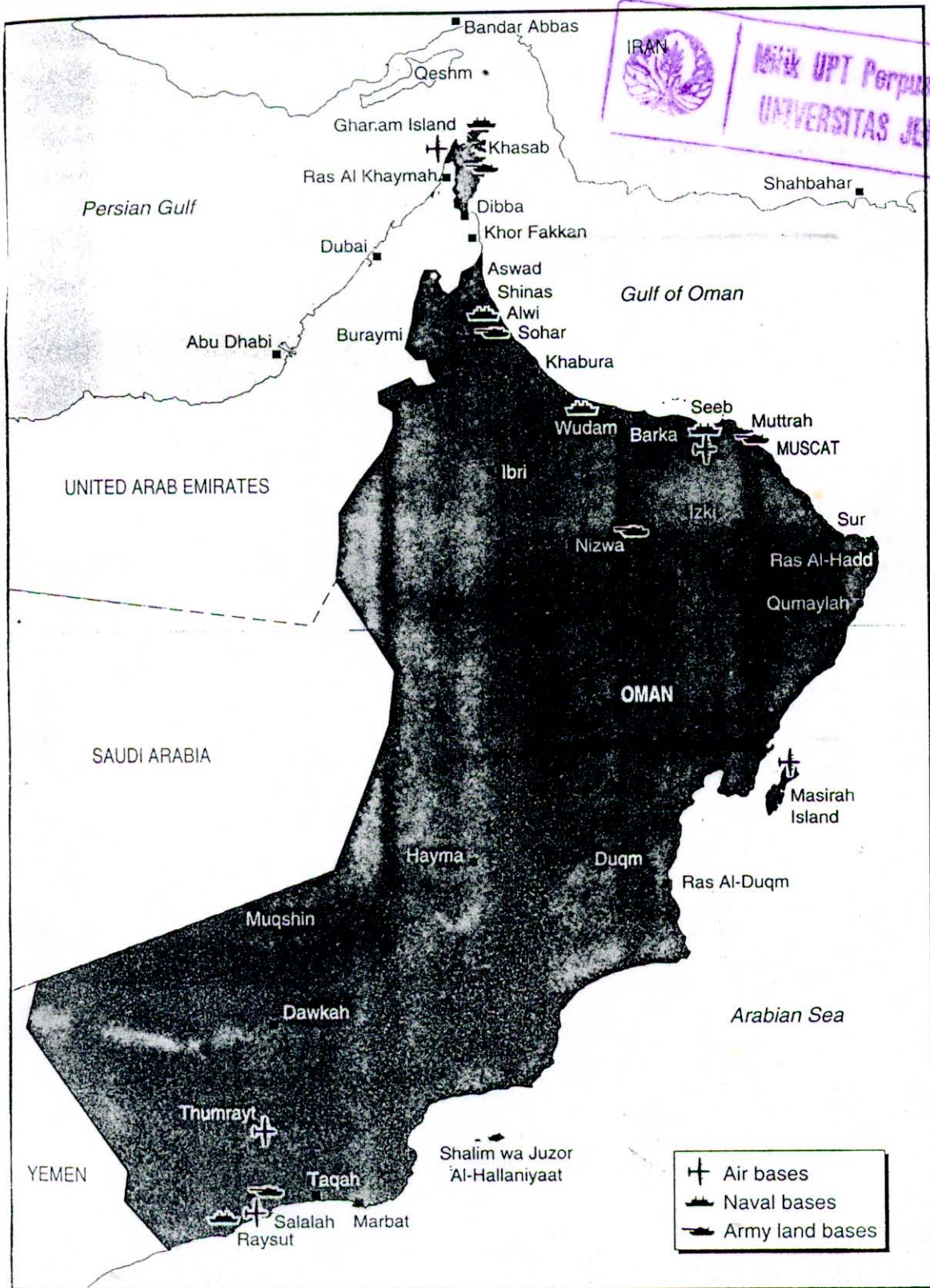
# THE MAP OF OMAN



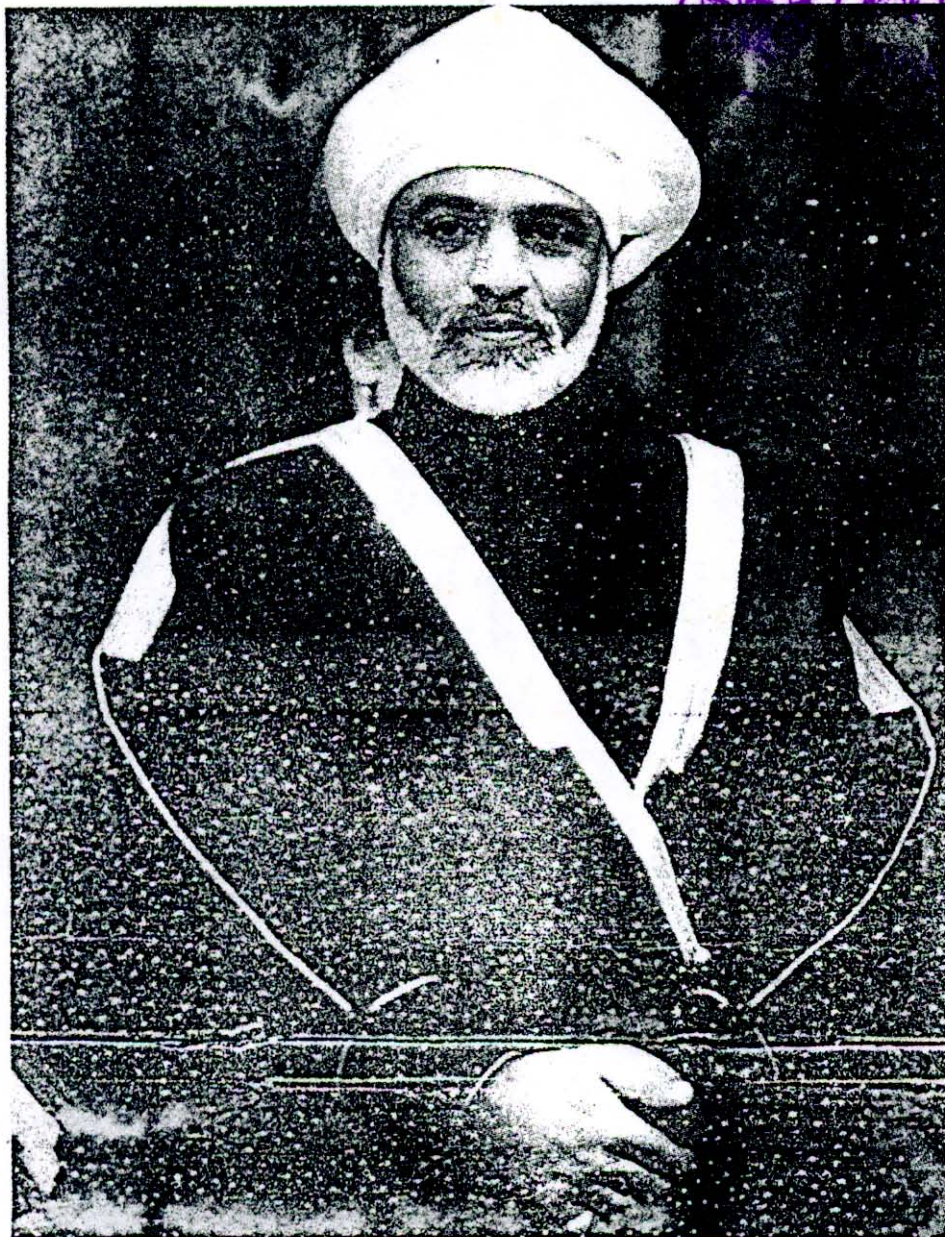
[www.mideastweb.org/moman.htm](http://www.mideastweb.org/moman.htm)

Omani Major Military Installation map

RANDMR680-mp7



Sumber: Joseph E. Kechichian, *Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy*, Rand, Santa Monica, hal.91



AP/WIDWORLD PHOTOS

*A cautious reformer: Sultan Qa'as bin Said*

Sumber: Foreign Affairs, Vol. 76, No. 3, Mei-Juni, 1997, hal. 15

Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER